



**UPAYA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DALAM MENANGGULANGI PENDANGKALAN
AQIDAH MASYARAKAT**

Oleh :

**Drs. Juhari, M.Si
NIP. 196612311994021006**

**Sumber Dana
BOP - PTN UIN Ar-Raniry**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2013**

ABSTRAK

Penduduk Kota Banda Aceh – sebagaimana Daerah lain dalam wilayah Provinsi Aceh – merupakan pemeluk agama Islam terbanyak. Secara etnis dapat dikatakan bahwa seluruh orang Aceh adalah pemeluk agama Islam bermazhab Syafi'ie dengan menganut i'tiqad ahlussunnah waljamaah. Keadaan ini telah berlangsung lama dan telah diwariskan secara turun temurun sehingga Islam telah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat Aceh. Secara sosiologis, masyarakat Aceh telah merasa cukup aman dan nyaman menjadi bagian dari masyarakat Islam tersebut, namun akhir-akhir ini kenyamanan itu telah terusik dengan munculnya gerakan pendangkalan aqidah yang dilakukan oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab, khususnya gerakan *Millata Abraham*. Gerakan ini telah menyedot perhatian semua elemen masyarakat di Aceh. Karena itu penelitian ini bertujuan menyelidiki faktor penyebab timbulnya gerakan pendangkalan aqidah dan juga menelusuri upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam merespons gerakan tersebut. Dalam rangka membantu mendapatkan data penyebab timbulnya gerakan ini maka digunakan teori konflik sebagai alat analisisnya, sedangkan untuk gambaran tentang upaya pemerintah Kota dalam menanggulangi gerakan ini didekati melalui teori Struktural Fungsional. Untuk mendapatkan data maka dilakukan *interview* dengan pihak terkait, studi dokumentasi dan observasi terbatas. Setelah proses pengumpulan dan analisis data dilakukan ditemukan data bahwa ada 2 (dua) faktor pemicu munculnya gerakan pendangkalan aqidah, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Menyikapi persoalan ini, Pemerintah Kota Banda Aceh telah memberikan respons positif bagi upaya penyelamatan aqidah umat Islam seperti perumusan regulasi dan pembentukan organisasi penyelamatan Aqidah, seperti Komite Penguatan Aqidah dan Peningkatan Amal Ibadah, pembentukan organisasi *Wilayatul Hisbah*, Tim amar ma'ruf nahyi munkar (Tamar) Kota, *Muhtasib Gampong*, dan lain-lain. Secara umum dapat dikemukakan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengembangkan 2 (dua) macam strategi dakwah untuk mengantisipasi gerakan pendangkalan aqidah, yaitu dakwah kultural dan dakwah struktural.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji hanyalah milik Allah, Dialah yang telah menunjuki manusia ke jalan yang benar dan Dia pula yang telah mengutuskan Rasul-Nya untuk memperkenalkan mana yang haq dan mana yang bathil. *Allahumma Shalli ala Muhammad wa alihi wa ash habih*. Atas Rahmat dan hidayah Allah SWT penelitian ini telah selesai dikerjakan meskipun masih terdapat kekurangan di sana-sini.

Terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini, khususnya Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Kepala Pusat Penelitian UIN Ar-Raniry, Pemerintah Kota Banda Aceh dan jajarannya yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan, Bapak Drs H A.Karim Syeikh, MA sebagai nara sumber yang telah memberikan sejumlah pemikiran dan masukan demi kesempurnaan penulisan. Terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan yang telah ikut memberikan gagasan-gagasan dan saran perbaikan untuk kesempurnaan penelitian ini.

Banda Aceh, 28 Oktober 2012

Peneliti.

DAFTAR ISI

LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN	(i)
RINCIAN BIAYA	(ii)
ABSTRAK	(iii)
KATA PENGANTAR	(iv)
DAFTAR ISI	
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penelitian	
D. Manfaat Penelitian	
BAB II : TINJAUAN TEORITIK	
A. Pengertian Aqidah	
B. Perkembangan Pemikiran Ilmu Tauhid	

C. Munculnya Gerakan Pendangkalan Aqidah Dalam
Sejarah Islam.....

D. Teori yang Relevan

.....

BAB III : METODE PENELITIAN

.....

A. Pendekatan Penelitian

.....

B. Fokus Penelitian

.....

..

C. Lokasi Penelitian

.....

.

D. Sumber dan Teknik Pengumpulan

Data.....

E. Analisis Data

.....

.....

F. Validitas Data

.....

.....

G. Design Penelitian

.....

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

.....

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

.....

1. Letak Geografis Kota Banda Aceh

.....

2. Visi dan Misi Kota Banda

Aceh.....

3. Keadaan

Penduduk.....

.....

4. Agama dan Adat Istiadat

.....

B. Faktor Penyebab Timbulnya Pendangkalan Aqidah

.....

C. Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam menanggulangi

Pendangkalan Aqidah di Banda Aceh

.....

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Upaya

Penguatan Aqidah

Masyarakat Kota Banda Aceh

.....

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan

.....

.....

B. Saran/ Rekomendasi

.....

DAFTAR BACAAN

.....

**UPAYA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DALAM MENANGGULANGI PENDANGKALAN
AQIDAH MASYARAKAT**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Sejak waktu yang cukup lama Aceh telah dikenal sebagai daerah basis umat Islam di Indonesia. Hampir bisa dipastikan bahwa seluruh orang Aceh itu menganut agama Islam. Kedekatan orang Aceh dengan Islam sudah tidak diragukan lagi. Dalam salah satu falsafah hidup orang Aceh disebutkan bahwa *“Adat bak Po Teumeureuhom hukom bak Syiah Kuala, Adat bak Putroe Phang Reusam bak Laksamana, Hukom ngon Adat lagee zat ngon Sifeut”*. Falsafah ini dipandang sangat merakyat, artinya hampir semua orang Aceh mengetahui dan mengakui ajaran falsafat tersebut berjalan dalam keseharian masyarakat. Fakta juga memperlihatkan bahwa masyarakat Aceh sangat menghargai dan menjunjung tinggi ajaran Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari. Penerimaan ajaran Islam sebagai warisan leluhur oleh masyarakat Aceh telah berlangsung sejak waktu yang lama dan hingga saat ini proses pewarisan ajaran tersebut masih terus bergulir dari waktu ke waktu. Bagi orang Aceh, Islam adalah satu-satunya agama yang dianut dan diyakini paling mampu memberikan kesejahteraan dan kenyamanan hidup bagi mereka

Namun akhir-akhir ini masyarakat di Provinsi Aceh sempat dihebohkan oleh munculnya gerakan sosial dengan mengatasnamakan agama. Gerakan ini telah diidentifikasi oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai aliran sesat yang dinilai mengemban misi melakukan pendangkalan aqidah masyarakat. Karena itu, target utama yang ingin ditelusuri melalui penelitian ini adalah munculnya gerakan pendangkalan aqidah dalam masyarakat Aceh. Dianggap sebagai masalah karena gerakan telah mengusik ketenangan umat Islam di Aceh khususnya pasca bencana alam tsunami. Mengingat masyarakat Aceh yang – secara sosiologis – menganut agama Islam, maka menjadi aneh ketika aliran-aliran yang menyimpang dari dasar-dasar syariat Islam itu berkembang di tengah-tengah mereka. Di satu sisi, fenomena ini diduga adanya unsur kesengajaan pihak tertentu untuk melemahkan Islam, namun di sisi lain patut juga dipertanyakan kesiapan para pemimpin (*umara*) dalam mempertahankan aqidah masyarakatnya. Sebab diyakini bahwa apabila perhatian dan upaya penyelamatan aqidah oleh pemerintah itu semakin tinggi maka akan semakin kecil peluang berkembangnya aliran-aliran sesat yang dapat membahayakan aqidah masyarakat.

Fenomena gerakan pendangkalan aqidah juga terjadi di Kota Banda Aceh. Banda Aceh adalah pusat ibu kota Pemerintah Aceh dengan kondisi masyarakatnya yang pluralistik. Secara umum penduduk Kota Banda Aceh berasal dari berbagai daerah seperti dari pesisir timur, barat, selatan dan tengah

bahkan banyak juga yang berasal dari luar Aceh seperti Medan, Jawa dan ada juga masyarakat daerah lain selain orang Indonesia seperti China yang sudah berdomisili di Aceh bahkan sudah sah menjadi warga Aceh. Sebagian mereka ada berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pengusaha, ada yang berdagang dan ada juga mahasiswa yang pada umumnya mereka berasal dari daerah luar Banda Aceh. Keberagaman Masyarakat Kota Banda Aceh tidak saja terjadi dalam aspek etnisitas semata-mata, akan tetapi juga dalam agama.

Selain agama Islam – yang sejak dulu hingga saat ini masih menempati posisi dominan – berkembang juga beberapa agama lain seperti agama Kristen, Hindu dan Budha. Meskipun demikian hubungan antar agama tetap terpelihara dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan bahwa di sepanjang sejarah Aceh belum pernah terjadi konflik antar agama, akan tetapi konflik yang mengatasnamakan agama itu biasa terjadi dalam masyarakat Aceh. Keberagaman agama membuat masyarakat tercampur aduk antara satu agama dengan agama lain sehingga teradopsi budaya agama lain tersebut pada diri masyarakat Banda Aceh.

Mengingat sebagian besar masyarakat Aceh merupakan penganut agama Islam, baik dalam lintas sejarah maupun dalam konteks kekinian, maka Pemerintah pusat baik secara *defacto* maupun *dejure* telah mengakui Aceh sebagai zona pelaksanaan Syariat Islam. Keputusan tersebut disambut positif oleh masyarakat karena secara sah dan resmi pemerintah telah memberikan ruang kepada mereka untuk menjalankan syariat

Islam secara *kaffah*. Meskipun demikian akhir-akhir ini timbul dinamika sosial keagamaan yang dipandang dapat membahayakan aqidah masyarakat, yaitu gerakan pendangkalan aqidah yang dimotori oleh *Millata Abraham*.

Secara sosiologis terdapat 3 (tiga) kelompok masyarakat yang dipandang sangat rentan atau berbahaya akibat pergerakan kelompok pendangkalan aqidah ini, yaitu (1) kelompok masyarakat miskin dan kelas menengah ke bawah; (2) kelompok masyarakat yang berpendidikan (berpengetahuan) rendah dan (3) kelompok orang-orang yang tidak memiliki pemahaman yang memadai terhadap Islam yang dianutnya. Kelompok-kelompok inilah yang selama ini dianggap telah terpengaruh oleh provokasi kelompok aliran sesat ini. Kelompok pendangkalan aqidah ini, khususnya *millata Abraham* mulai muncul di Kota Banda Aceh sejak tahun 2010 yang ikut disponsori juga oleh putera-puteri Aceh. Kelihatannya hingga saat ini gerakan tersebut masih tetap harus diwaspadai sehingga tidak berakibat fatal bagi keberlangsungan syariat Islam di Aceh. Karena itu Pemerintah Kota Banda Aceh agaknya perlu merumuskan langkah dan upaya strategis untuk menyelamatkan agama dan masyarakat Islam di Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh.

Menurut Muslim Ibrahim, gerakan *Millata Abraham* (Mukmin Muballigh) difatwakan sebagai aliran sesat oleh MPU dengan beberapa alasan antara lain mereka tidak percaya kepada rukun iman, mengingkari rukun Islam. Mereka juga menafsirkan

Quran dengan kaidah yang salah, ucapan *Bismillah* diartikan dengan isme Allah, mereka juga menghina para nabi dan rasul. Nabi Isa dituding punya bapak, Sitti Maryam tidak punya suami, itu berarti Maryam bersetubuh dengan Allah. Muslim menambahkan bahwa para pengikut ajaran itu merupakan pengikut Ahmad Musaddiq yang kini di penjara di pulau Jawa karena mengembangkan aliran sesat *al-Qiyadah*.¹

Dalam menjalankan ajarannya para pengikut aliran tersebut menamakan dirinya *Mukmin Muballigh* yaitu missionarinya *Millata Abraham*. Selain itu, aliran itu mengingkari hadits dan tidak meyakini sebagai sumber kebenaran, serta mengingkari shalat lima waktu. Yang mereka akui adalah shalat malam saja itu pun dilaksanakan dengan posisi duduk dengan menghadap lilin yang telah dinyalakan dan lampu dimatikan. Aliran ini juga tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul Allah yang terakhir dan diyakini masih ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW.

Harian Serambi Indonesia mensinyalir ada 3 (tiga) orang aktivis *Millata Abraham* yang dicurigai mengembangkan aliran sesat di Gampong Prada, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, sempat diamankan polisi di Mapolresta Banda Aceh untuk menghindari amuk massa. Ketiga pengikut Komar yang diamankan itu masing-masing Zainuddin, Wisbar alias Buyung, dan Iqbal. Polisi membawa ketiganya setelah massa semakin

¹ Atjeh post Tuesday, 15 March 2011.

ramai mengitari Masjid Jami Al-Hidayah, Prada saat salah seorang di antara pengikut Komar bernama Zainuddin dimintai keterangan oleh aparat gampong di masjid tersebut.² Setelah ditelusuri dengan mendalam ternyata Zainuddin merupakan pimpinan aliran sesat Millata Abraham untuk wilayah Aceh. Isterinya juga bergabung ke sana dan sekarang bergelar bunda maria, sementara dua anak kandungnya yaitu Jimmy dan Fajri juga menjadi kader aliran tersebut yang gencar menyebarkan aliran itu di Banda Aceh. Kedua putera tersebut akhirnya ditangkap pihak keamanan Kota Banda Aceh di sebuah toko bertingkat tiga tempat mereka berjualan di Jalan Teratai, Kelurahan Gampong Baro, Kota Banda Aceh.³

Sebagai daerah syariat Islam seharusnya masalah pendangkalan aqidah tidak terjadi dalam masyarakat Aceh, namun faktor kemiskinan, lemahnya tingkat keimanan dan rendahnya ilmu pengetahuan tentang agama Islam di kalangan sebagian masyarakat Aceh saat ini telah ikut mempengaruhi mereka terjebak ke dalam gerakan pendangkalan aqidah yang dikembangkan oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab.

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari fenomena dan permasalahan di atas, maka beberapa pertanyaan penelitian berikut dipandang perlu

² Serambi Indonesia, 2 April 2011

³ Serambi Indonesia, 18 April 2011

diajukan untuk dicari jawabannya melalui proses pengumpulan data, sebagai berikut :

1. Apa saja faktor penyebab timbulnya pendangkalan aqidah dalam masyarakat Kota Banda Aceh ?
2. Apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam menanggulangi pendangkalan aqidah tersebut ?
3. Apa saja Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam upaya penanggulangan pendangkalan aqidah dalam masyarakat Kota Banda Aceh ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis beberapa faktor penyebab terjadinya pendangkalan aqidah dalam masyarakat Kota Banda Aceh.
2. Mendapatkan data akurat mengenai upaya-upaya atau langkah-langkah Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menanggulangi pendangkalan aqidah.
3. Mendapatkan gambaran dan menganalisis beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat yang dirasakan Pemerintah dalam upaya menanggulangi pendangkalan aqidah dalam masyarakat Kota Banda Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memiliki 2 (dua) manfaat besar, sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis – Teoritis.

Secara akademik penelitian ini diharapkan mampu memperkuat upaya pengembangan keilmuan yang dilakukan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, serta mampu menambah khazanah keilmuan dalam upaya pengembangan teori-teori ilmu sosiologi khususnya sosiologi agama atau ilmu sosial lain yang terkait.

2. Manfaat Praktis.

Di samping manfaat akademis, penelitian ini juga diharapkan memiliki manfaat praktis/ pragmatis khususnya bagi upaya penyelamatan aqidah masyarakat Islam di wilayah Kota Banda Aceh, terutama dalam memformulasikan bentuk penguatan aqidah bagi masyarakat Kota.

BAB II

TINJAUAN TEORITIK

A. Pengertian Aqidah Islamiyah

Kata aqidah Islamiyah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu “aqidah” dan “Islamiyah”. Secara etimologi, kata “aqidah” diambil dari kata dasar “al-‘aqdu” yaitu *ar-rabth* (ikatan), *al-Ibraam* (pengesahan), *al-ihkam* (penguatan), *at-tawatstsuiq* (menjadi kokoh, kuat), *asy-syaddubiquwwah* (pengikatan dengan kuat), *at-tamaasuk* (pengokohan) dan *al-itsbaatu* (penetapan).⁴ Beberapa pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa aqidah adalah suatu ikatan yang kuat antara manusia dengan Tuhannya.

Secara terminologi ditemukan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli yaitu sebagai berikut :

1. Menurut T.M. Hasbi ash-Shiddieqy: aqidah adalah urusan yang harus dibenarkan dalam hati dan diterimanya dengan cara puas, serta tertanam kuat ke dalam lubuk jiwa dan tidak dapat digoncangkan oleh badai subhat.

⁴ Lois Ma'luf, 1997. *Al-Munjid*, Dar al-Masyriq, Beirut, hlm. 519.

2. Hassan al-Banna, mendefinisikannya sebagai sesuatu yang mengharuskan hati membenarkannya, yang membuat jiwa menjadi tenang, tentram dan yang menjadikan kepercayaan yang bersih dari kebimbangan.⁵
3. Siradjuddin Abbas menyebutkan bahwa aqidah merupakan dasar-dasar keimanan yang mencakup keimanan tentang ketuhanan, Malaikat, Kitab suci, Rasul, hari akhir serta Qadha dan Qadar.⁶
4. Samsul Bahri mendefinisikan aqidah dengan suatu ilmu yang menjelaskan tentang keyakinan atau i'tiqad yang benar tentang Allah.⁷

Sedangkan kata “*Islamiyah*” diambil dari kata “*Aslama* atau *Islam*” yang berarti berserah diri kepada Allah. Dasar kata- kata Islam adalah *sallama* yang diungkapkan *salim* berarti “damai”, berhubul dari kata *aslama* yang mengandung arti telah menyerah, yakni berserah diri kepada kehendak-Nya. Al-Islam atau Islam adalah agama yang membawa kedamaian bagi umat manusia selama mereka berserah diri kepada Tuhan, dan pasrah atas kehendak-Nya. Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan telah mendapat pengakuan di sepanjang sejarah umat manusia sejak nabi Adam sampai nabi terakhir.⁸

⁵ Hassan al-Banna, 1983 *Aqidah Islam*, Terj. H. Hassan Baidlowi, al-Ma'arif, Bandung, hlm.9.

⁶ Siradjuddin Abbas, 2008, *I'tiqad Ahlussunnah Waljamaah*, cet. 8, Pustaka Tarbiyah Baru, Jakarta, hlm.27.

⁷ Samsul Bahri, 2011, *Tuntunan Aqidah*, Dinas Syariat Islam Aceh, hlm.2.

⁸ Khurshid Ahmad, dkk. 1989, *Prinsip-prinsip Pokok Islam*, Rajawali Press, Jakarta

Berpijak dari pengertian dan definisi di atas dapat dikemukakan bahwa aqidah Islamiyah adalah suatu prinsip dasar keimanan manusia terhadap keesaan Tuhan (Allah). Kajian mendalam terhadap prinsip dasar keimanan ini telah mendorong lahirnya ilmu Tauhid atau ilmu aqa'id yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah SWT. Keimanan terhadap keesaan Allah ini dipandang dapat menjadi faktor pendorong utama manusia menjadi orang yang tunduk dan patuh terhadap semua perintah dan larangan-Nya secara ikhlas dan suka rela.

Di sepanjang sejarah umat manusia ditemukan fakta bahwa setiap masyarakat memiliki naluri atau kecenderungan untuk hidup beragama. Karena itu setiap masyarakat selalu mencari agama dalam hidupnya. Pencarian tersebut tidak selalu berakhir dengan sebuah penemuan agama yang sesungguhnya, akan tetapi agama yang bersifat relatif atau disebut dengan agama *ardhi*. Agama yang sesungguhnya adalah agama *samawi* atau agama wahyu, yaitu Islam. Islam merupakan agama yang telah berkembang di seluruh dunia. Beberapa negara telah diakui sebagai pemeluk Islam terbanyak, seperti Arab Saudi dan beberapa negara lain di kawasan Timur Tengah, Malaysia, Brunei Darussalam dan Indonesia. Salah satu kawasan terbanyak pemeluk Islam di Indonesia adalah Provinsi Aceh, yaitu suatu Provinsi paling barat Indonesia.

Studi terhadap aqidah Islamiyah terus saja bergulir di sepanjang sejarah masyarakat Islam sehingga telah melahirkan sejumlah dinamika tersendiri di sekitar pemahaman para ilmuwan

muslim (ulama) terhadap konsep aqidah. Karena itu, lahirlah sejumlah pemikiran dinamis berkenaan dengan ilmu aqidah atau ilmu tauhid ini.

B. Perkembangan Pemikiran Dalam bidang Kalam.

Pada masa Rasulullah SAW masih hidup, segala persoalan keagamaan yang dirasakan masyarakat, baik dalam dimensi teoritik maupun dimensi praktik, dapat ditanyakan langsung kepada beliau sehingga tidak ada celah bagi timbulnya perbedaan pandangan/ pemikiran dalam hal menjalankan syariat Islam. Namun setelah Rasulullah SAW wafat, yaitu pada tanggal 12 Rabiul awal tahun ke-8 hijriah atau bertepatan dengan tanggal 8 Juni 632 M, maka terjadilah berbagai pandangan dalam memahami inti ajaran syariat Islam itu sendiri. Perselisihan itu diawali dengan muncul dan berkembangnya ilmu Kalam.

Perbedaan pandangan di kalangan para ahli (ulama Kalam) saat itu telah mendorong lahirnya berbagai aliran, paham atau sekte dalam masyarakat Islam. Fenomena ini sesungguhnya telah dirasakan sendiri oleh Rasul semasa hidupnya. Karena itu beliau telah memberikan *warning* tentang timbulnya kelompok/ aliran yang tidak sedikit dalam masyarakat Islam, termasuk aliran-aliran pemikiran dalam ilmu tauhid/ aqidah. Beberapa data menyebutkan bahwa umat Islam itu terpecah ke dalam 73 golongan. Golongan-golongan tersebut dinyatakan sebagai kelompok sesat kecuali satu aliran saja yaitu kelompok ahlussunnah waljamaah. Namun di sini hanya diungkapkan beberapa kelompok saja, antara lain sebagai berikut :

1. *Syi'ah*.

Syi'ah adalah sekelompok masyarakat yang memberikan penghormatan secara berlebihan kepada Ali bin Abi Thalib. Secara bahasa, syi'ah berarti pengikut. Arti ini memang benar karena mereka merupakan pengikut Ali bin Abu Thalib yang terkenal setia. Secara terminologi syi'ah merupakan masyarakat yang beri'tiqad bahwa Saidina Ali adalah orang yang paling berhak menduduki jabatan Khalifah setelah Rasulullah wafat. Mereka menyebutkan bahwa pengangkatan Abubakar as-Siddiq, Umar bin Khattab dan Usman bin Affan masing-masing sebagai Khalifah pertama, kedua dan ketiga merupakan tindakan yang tidak sah. Menurut mereka yang berhak diangkat menjadi Khalifah adalah Ali bin Abi Thalib.

Ideologi kaum syiah meyakini bahwa ketiga Khalifah sebelum Ali adalah perampok-perampok jabatan yang dosanya sangat besar.⁹ Penghormatan yang berlebihan ini telah berdampak pada pengingkaran mereka terhadap eksistensi para khalifah yang lain. Inilah di antara kekeliruan kaum Syiah sehingga dianggap telah ikut berpengaruh terhadap eksistensi keimanan kaum muslimin dari masa ke masa.

2. Khawarij.

Khawarij merupakan suatu kelompok yang secara berlebihan membenci Ali bin Abi Thalib, bahkan di antara

⁹ Siradjuddin Abbas, *Op.Cit*, hlm.93.

mereka ada yang telah menganggap saidina Ali sebagai kafir. Fatwa kafir yang dijatuhkan kepada saidina Ali disebabkan karena Ali telah menerima tawaran damai yang diajukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dalam sebuah konflik politik, yaitu perang siffein. Peristiwa ini dikenal dalam sejarah Islam dengan sebutan *Tahkim*. Bagi sebagian pengikut Ali, Muawiyah adalah tokoh politik yang licik sehingga tidak pantas diikuti, dan manakala Ali telah bersedia berdamai dengan Muawiyah, maka Ali pun dianggap telah melakukan dosa besar. Karena itu, dalam perspektif kaum Khawarij, melakukan dosa besar sama dengan kafir, karena itu Ali langsung difonis sebagai kafir meskipun beliau merupakan sahabat Rasulullah SAW.

Kelompok Khawarij tidak saja membenci saidina Ali karena dinilai sangat lemah dalam menegakkan kebenaran, akan tetapi juga membenci Muawiyah bin Abi Sofyan karena dinilai telah merongrong Khalifah yang sah, yaitu saidina Ali bin Abi Thalib. Karena itulah mereka disebut dengan nama Khawarij yang berarti keluar. Artinya mereka telah keluar atau tidak lagi mendukung Ali dan juga tidak mendukung Muawiyah. Dari perspektif aqidah Islamiyah, sesungguhnya penarikan dukungan politik terhadap saidina Ali pada dasarnya tidak ada masalah, akan tetapi ketika Ali telah diposisikan sebagai orang kafir karena peristiwa *tahkim*, maka telah menyeret umat Islam ke jurang yang membayakan aqidah.

Sebab mengkafirkan orang yang jelas telah beriman kepada Allah merupakan suatu kekeliruan yang perlu diluruskan.

3. Muktazilah.

Istilah muktazilah menurut banyak diartikan dengan sekelompok orang yang mengasingkan diri atau menyisihkan diri. Siradjuddin Abbas mengutip pendapat Ahmad Amin, penulis buku *Fajru al-Islam* yang menyebutkan bahwa kaum muktazilah ini bukan sekedar mengyisihkan diri dari majelis guru atau dari masyarakat banyak, akan tetapi lebih jauh dari itu, mereka telah menyisihkan pahamnya dari paham atau i'tiqad umat Islam secara umum. Beranjak dari pendapat itu Siradjuddin menguatkan pendapatnya bahwa kaum muktazilah benar-benar telah tergelincir dari ajaran Islam yang sebenarnya.¹⁰

Dalam mengembangkan pemahamannya, kaum muktazilah ini cenderung lebih banyak menggunakan aqal/ rasional sehingga dengan pola demikian mereka telah mampu menghebohkan dunia Islam dan telah memegang peran penting dalam sistem kekhalifahan Islam, khususnya pada zaman Khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Pembahasan tentang kaum muktazilah ini selalu dihubungkan dengan 2 (dua) orang tokoh besar yaitu Washil bin Atha' di Bashrah (Iraq) dan Basyar bin Mu'tamar di Baghdad.¹¹

¹⁰ Siradjuddin Abbas, *Op.Cit*, hlm.193.

¹¹ *Ibid*, hlm.195.

Sekte muktazilah ini dipandang berbahaya bagi eksistensi aqidah umat Islam karena terlalu mendewakan akal di atas segalanya. Bagi mereka, akal merupakan sebuah potensi yang diberikan Allah untuk bisa menaklukkan alam dan seisinya. Karena itu kedudukan akal dianggap lebih tinggi dari pada kedudukan Al-Qur'an maupun as-Sunnah.

4. Jabariyah.

Paham Jabariyah pada mula dipopulerkan oleh Jaham bin Shafwan. Jaham merupakan seorang sekretaris Harits bin Sureikh yang memberontak terhadap dinasti Bani Umayyah. Di samping sebagai seorang sekretaris Jaham dikenal sebagai seorang pendakwah yang gigih menyeru manusia ber-*amar ma'ruf nahi munkar*. Karena itu namanya semakin dikenal oleh masyarakat luas. Pada dasarnya apa yang dikembangkan oleh kaum Jabariyah ini tidak ada yang perlu dikuatirkan karena mereka beranggapan bahwa apapun yang ada dan terjadi di alam ini pada hakikatnya dijadikan oleh Tuhan.

Namun akhirnya mereka sampai kepada sebuah keyakinan yang dapat merusak aqidah umat Islam melalui sebuah statemen yang mengungkapkan bahwa meninggalkan Shalat, puasa atau melakukan berbagai kejahatan lainnya dianggap tidak mengapa karena semua itu telah diatur oleh Tuhan.¹²Inti dari i'tiqad Jabariyah menyebutkan bahwa manusia tidak memiliki kemampuan apa-apa dalam hidupnya. Apapun yang terjadi dan dikerjakan oleh manusia telah

¹² *Ibid*, hlm. 276.

ditentukan sebelumnya oleh Tuhan. Karena itu apapun bentuk kejahatan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berdampak pada adanya dosa dan tidak akan disiksa di akhirat kelak, karena apapun yang dikerjakannya merupakan perwujudan dari kehendak Tuhan.

Stetemen demikian dipandang sangat membahayakan aqidah umat Islam karena di samping telah menyalahkan Tuhan juga telah mengabaikan faktor usaha/ ikhtiar yang diberikan Tuhan kepada manusia. Pada dasarnya Tuhan memang menentukan segala sesuatu di alam ini, namun Tuhan juga telah memberikan kemampuan kepada manusia untuk membedakan antara hak dan batil dan membedakan antara ikhtiar dan takdir.

5. Ahlussunnah waljama'ah

Kelompok Ahlussunnah waljamaah merupakan sebuah kelompok yang didirikan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ri. Paham ini memiliki pengaruh yang kuat disejumlah negara Islam dan negara berpenduduk muslim, seperti di Malaysia, Brunei dan Indonesia. Aliran ini dipandang sebagai sebuah aliran dalam ilmu *aqa'id* yang bersifat moderat dalam mengembangkan pahamnya. Asy'ari mengembangkan idenya yang menyebutkan bahwa Tuhan itu memiliki sifat-sifat tertentu. Menurutnya, di antara sifat-sifat tersebut terdapat 20 sifat yang wajib dikethui oleh umat Islam yang dikenal dengan sebutan sifat duapuluh. Paham ahlussunnah waljamaah

dipandang sebagai satu-satunya aliran yang lurus dan masih murni memperjuangkan kebenaran aqidah umat Islam.

Di antara kriteria kaum ahlussunnah waljamaah adalah meyakini keesaan Allah baik zat, sifat maupun af'al, menjadikan al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman utama dalam menetapkan sesuatu dan tidak saling mengkafirkan antar sesama kaum muslimin. Untuk mengenal aliran ahlussunnah waljamaah secara lebih rinci, maka MPU Aceh telah menetapkan sejumlah kriteria melalui suatu sidang paripurna yang dilaksanakan pada tanggal 22 – 24 Agustus 2011. Sidang Paripurna tersebut menetapkan 34 kriteria aliran ahlussunnah waljamaah, yaitu sebagai berikut :

1. Imam adalah mengikrarkan dengan lisan, membenarkan dengan hati dan dikerjakan dengan anggota.
2. Beriman kepada Allah, Malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya, Hari akhir, dan Qadha – Qadar dari Allah SWT.
3. Meyakini keesaan zat, sifat dan *af'al* yang berdasarkan dalil aqli dan naqli.
4. Meyakini adanya sifat ma'ani bagi Allah.
5. Aqidah yang berdasarkan kitabullah dan Hadits shahih sesuai pemahaman para Sahabat serta ijma' para salafush shalih.
6. Mengambil dalil aqli yang jelas dan sesuai dengan dalil naqli dan apabila bertentangan maka akan mendahulukan dalil naqli.

7. Meyakini dan mengimami al-Qur'an sebagai kalamullah yang qadim dan azali bukan makhluk yang baharu.
8. Meyakini bahwa Allah tidak wajib berbuat baik kepada hamba-Nya.
9. Meyakini bahwa pemberian Surga adalah semata-mata karunia Allah.
10. Tidak mengkafirkan sesama muslim sebelum jelas dalil syar'i.
11. Aqidah *mutawassithah/ mu'tadilah* yang sesuai nash dan tidak *ghuluw/ ifrath* (berlebih-lebihan) dan *Jafa'/ tafrith* (kurang).
12. Meyakini bahwa hanya para Nabi dan Rasul saja yang *ma'shum*.
13. Meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan penutu segala Nabi dan Rasul.
14. Meyakini bahwa pangkat kerasulan/ kenabian adalah karunia yang diberikan Allah kepada siapa saja yang dikehendakin-Nya dan tidak dapat diupayakan.
15. Meyakini bahwa sekalian keluarga Nabi Muhammad SAW, khususnya Siti Aisyah ummul mukminin adalah bersih dari segala tuduhan.
16. Meyakini bahwa sahabat Nabi yang paling mulia adalah sesuai dengan urutan kekhalifahannya.
17. Meyakini bahwa perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat bukan didasari oleh kesalahan dan nafsu akan tetapi karena dasar perbedaan ijtihad.

18. Meyakini bahwa yang paling mulia di antara makhluk Allah adalah Nabi Muhammad SAW dan diikuti oleh para Rasul, para Nabi dan Malaikat.
19. Memahami ayat-ayat *mutasyabihat* menurut pemahaman salaf secara *tafwidh ma'a tanzih* (menyerahkan maksudnya kepada Allah serta membersihkan dari yang tidak layak pada Allah) atau menurut pemahaman khalaf secara takwil (mencarikan makna yang sesuai dengan kesempurnaan Allah).
20. Kehidupan seseorang mesti memadukan ikhtiar dan tawakkal kepada Allah.
21. Beriman kepada adanya azab dan nikmat kubur.
22. Meyakini bahwa surga dan neraka bersama penghuni keduanya akan kekal selamanya kecuali orang mukmin yang berbuat maksiat, maka nantinya akan dikeluarkan dari neraka.
23. Meyakini adanya dosa besar dan dosa kecil serta tidak mengkafirkan pelaku dosa besar.
24. Meyakini bahwa Malaikat tidak pernah melakukan kesalahan.
25. Meyakini bahwa iman seorang mukmin dapat bertambah dan berkurang.
26. Mengimani bahwa isra' dan mi'raj Nabi Muhammad dengan jasad dan roh.
27. Meyakini adanya mukjizat kepada Rasul.

28. Meyakini adanya karamah yang diberikan Allah kepada hamba-hamba pilihan-Nya.
29. Meyakini adanya hari kebangkitan, mizan, sirath, arasy, kursiy dan Qalam pada tempat yang tinggi dan mulia tetapi hanya Allah yang mengetahuinya.
30. Mengimani bahwa seluruh manusia berasal dari Nabi Adam sebagai manusia pertama yang diciptakan dari tanah.
31. Mengimani adanya syafaat 'Udhma pada hari akhirat dari Nabi Muhammad SAW.
32. Mengimani bahwa Allah dapat dilihat di surga oleh penghuni surga.
33. Mengimani bahwa surga dan neraka ada dan telah ada.
34. Mengimani bahwa umat Nabi Muhammad yang meninggal dalam keadaan beriman mendapat pahala dari amalan selama hidupnya dan memperoleh manfaat dari do'a orang yang masih hidup.

Dalam pandangan kaum ahlussunnah waljamaah, keyakinan yang berlawanan dengan prinsip atau kriteria di atas dipandang sebagai sesuatu yang membahayakan aqidah atau disebut dengan ajaran sesat. Aliran sesat dinilai sangat berbahaya tidak saja bagi ummat Islam akan tetapi juga bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Menurut Zulkarnain Abdullah munculnya aliran pendangkalan aqidah (sesat) minimal dapat merusak sendi-sendi kehidupan beragama, dan berbangsa, khususnya dalam 4 (empat) aspek berikut :

1. Merusak iman/ aqidah umat sehingga membuat umat Islam itu tersesat ke luar dari Imam/ aqidah yang selama ini diyakini, seperti Rukun Iman yang 6 (enam) macam, dan Rukun Islam yang 5 (lima) macam itu.
2. Lahirnya singkritisme baru berupa agama “gado-gado” yaitu perpaduan antara agama, seperti yang dipopulerkan oleh Millata Abraham yang mencoba memadukan 3(tiga) agama, yaitu Islam, Yahudi dan Nasrani menjadi satu agama. Pada masyarakat sudah memahami bahwa ketiga agama itu adalah berbeda, bukan satu agama.
3. Munculnya sikap saling mencurigai dan sikap saling tidak percaya dalam kehidupan umat Islam sehingga umat Islam sangat rentan untuk diadu dan dibenturkan dengan kekuatan-kekuatan lain baik secara intern maupun ekstern.
4. Menimbulkan keresahan masyarakat, mengganggu keamanan dan ketertiban serta berpotensi menimbulkan disorganisasi sosial dan bahkan disintegrasi bangsa.

Berpijak dari beberapa penjelasan di atas dapat dikemukakan bahwa di antara 73 kelompok yang muncul di kalangan umat Islam, hanya satu kelompok saja yang diyakini benarnya, yaitu *i'tiqad ahlussunnah waljamaah*. Kelompok ini agak lebih moderat bila dibandingkan dengan kelompok-kelompok lain yang ada. Kelompok ahlussunnah waljamaah ini menjadi dikenal dan disenangi banyak masyarakat karena selalu menjaga keseimbangan antara kemampuan rasional atau akal dengan wahyu.

Masyarakat Kota Banda Aceh merupakan pemeluk Islam terbesar dibandingkan dengan berbagai agama yang berkembang di Banda Aceh. Keyakinan atau i'tiqad yang dianut oleh masyarakat Islam Aceh berpegang pada i'tiqad kaum ahlussunnah waljamaah. Karena itu setiap gerakan sosial keagamaan yang dinilai telah melenceng dari prinsip-prinsip dasar keimanan atau i'tiqad ahlussunnah waljamaah dipandang sebagai suatu aliran, sekte atau gerakan yang dapat mengganggu eksistensi aqidah umat Islam.

C. Konsep Pendangkalan Aqidah Islamiyah.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa sejak waktu yang lama masyarakat Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh, telah menjalani kehidupan sosial mereka secara aman dan damai bersama syariat Islam yang mereka yakini. Namun ketenangan tersebut telah ternoda dengan gerakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan provokasi dan penodaan terhadap prinsip dasar ajaran Islam. Gerakan ini telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat karena mereka telah merasakan agama dan aqidahnya telah dilecehkan oleh kelompok yang tidak senang dengan ajaran Islam, yaitu gerakan pendangkalan aqidah di seluruh Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh.

Istilah pendangkalan diambil dari kata dangkal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata dangkal diartikan dengan tidak dalam, belum paham atau belum memahami sesuatu (ilmu pengetahuan) secara mendalam. Sedangkan istilah

pendangkalan diartikan dengan suatu proses atau cara yang dilakukan untuk mendangkalkan sesuatu.¹³ Berdasarkan pengertian tersebut maka pendangkalan aqidah dapat dimaknai dengan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara bersahaja, terprogram dan sistematis yang dilakukan oleh individu atau organisasi tertentu dengan maksud melemahkan atau mendangkalkan aqidah umat Islam. Target utama pendangkalan aqidah ini adalah untuk melemahkan umat Islam dari dalam dengan cara menyelewengkan keyakinan (aqidah) mereka dari aqidah yang kuat dan lurus menjadi aqidah yang lemah dan terkontaminasi oleh unsur pemikiran yang membahayakan.

Tujuan utama gerakan pendangkalan aqidah ini adalah menyesatkan umat Islam dari aqidah yang sebenarnya. Hal ini dapat saja terjadi akibat kurangnya pemahaman (pengetahuan) tentang agama Islam dan kekurangan ekonomi. Pemahaman pengetahuan agama Islam yang sangat minim ditambah lagi dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil maka akan dapat mengakibatkan seseorang tidak konsisten terhadap kepercayaan yang selama ini dianutnya. Ketika hal tersebut terjadi pada masyarakat maka dengan sangat mudah dia akan pindah keyakinan yang menurut mereka keyakinan baru dianutnya ini dapat membawa sebuah perubahan bagi kehidupannya.

Pendangkalan aqidah merupakan masalah yang sangat riskan yang harus segera ditanggulangi, hal ini mengingat maraknya isu-isu yang berkembang selama ini tentang masalah

¹³ Tim Penyusun, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, hlm.235.

pendangkalan aqidah oleh kaum misionaris. Dewasa ini hal-hal kecil yang dianggap sepele tapi bisa mengakibatkan kepada pendangkalan aqidah. Dalam mempertahankan akidah yang benar di zaman modern yang serba canggih, umat Islam khususnya generasi muda harus berhadapan dengan kekuatan materialisme, zionisme dan sekularisme yang berusaha mengrogoti akidah umat Islam, ibarat rayap yang hinggap pada sebuah pohon.

Tujuan utama misionaris adalah memurtadkan umat Islam dari agamanya atau paling tidak mengelabui umat Islam, khususnya generasi muda agar mereka tidak mengetahui apa-apa dan melenceng dari ajaran Islam, baik itu masalah yang kecil maupun besar. Kondisi terakhir yang menimpa umat Islam di Aceh – khususnya Kota Banda Aceh merupakan tamparan besar bagi semua elemen yang terkait, seperti ulama, umara dan para tokoh masyarakat. Umara, dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Banda Aceh merupakan penanggungjawab utama bagi upaya menyelamatkan aqidah masyarakatnya.

Untuk mengetahui sesuatu gerakan itu bisa merusakan aqidah atau tidak, maka perlu diuraikan secara sederhana kondisi sosial keagamaan masyarakat di Kota Banda Aceh. Secara sosiologi, masyarakat Aceh – sebagaimana juga rakyat Indonesia secara umum – merupakan penganut mazhab Imam Syafi'i dengan berpegang pada *i'tiqad ahlussunnah waljamaah*. Karena itu sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip *ahlussunnah*

waljamaah itu dapat dipandang sebagai sesuatu yang sesat atau menyesatkan.

Untuk mengukur sesuatu itu sesat atau tidak sehingga dapat berimplikasi tidak baik bagi aqidah Islamiyah masyarakat, maka Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) telah merinci beberapa aliran sesat yang membahayakan aqidah masyarakat. Berdasarkan Fatwa MPU Propinsi Aceh nomor 04 tahun 2007 disebutkan bahwa suatu aliran dapat disebut sesat apabila memenuhi (terdapat) salah satu dari kriteria berikut :

1. Mengingkari salah satu rukun iman yang 6 (enam), yaitu : (1) Beriman kepada Allah, (2) kepada Malaikat-Nya, (3) Kitab-kitab-Nya, (4) Rasul-Nya, (5) hari akhirat dan (6) beriman dengan qadha dan qadar.
2. Mengingkari salah satu Rukum Islam yang 5 (lima), yaitu : (1) mengucapkan dua kalimah syahadat, (2) menunaikan shalat , (3) mengeluarkan zakat, (4) berpuasa di bulan ramadhan dan (5) naik haji ke baitullah.
3. Meyakini dan mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan I'tiqad ahlussunnah waljamaah.
4. Meyakini Turunnya wahyu setelah Al-Qur'an.
5. Mengingkari kemurnian al-Qur'an.
6. Menafsirkan Al-Qur'an tidak berdasarkan Kaidah ilmu Tafsir.
7. Mengingkari kedudukan Hadits sebagai Sumber Ajaran Islam.

8. Melakukan pensyarahannya Hadits tidak berdasarkan ilmu Mustalah Hadits.
9. Menghina/ melecehkan para Nabi/ Rasul.
10. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi/ Rasul terakhir.
11. Menghina/ melecehkan para Sahabat Nabi Muhammad Saw.
12. Merubah (menambah/ mengurangi) pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh Syariat, seperti berhaji tidak ke Baitullah, Shalat bukan 5 waktu, dll..
13. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i.¹⁴

Berdasarkan kriteria tersebut dapat dikemukakan bahwa bahwa suatu aliran dapat dikategorikan sebagai aliran sesat yang dapat membahayakan aqidah umat Islam apabila aliran tersebut secara nyata bertentangan dengan prinsip ahlussunnah waljamaah.

D. Pendangkalan Akidah Dalam Lintas Sejarah Islam

Aktivitas pendangkalan aqidah bukanlah hal baru dalam sejarah umat Islam, akan tetapi persoalan tersebut telah berlangsung lama. Di sepanjang sejarah Islam ditemukan bahwa sejak zaman Rasulullah masih hidup, gerakan pendangkalan aqidah ini sudah mulai ada khususnya yang dikembangkan oleh Abdullah bin Ubay, tokoh munafiq yang sering membolak-balikkan fakta dalam rangka mencari keuntungan sendiri. Di zaman Khalifah Abubakar as-Shiddiq, gerakan ini juga muncul

¹⁴ MPU - NAD, 2008, *Fatwa Pedoman Identifikasi Aliran Sesat*, Banda Aceh, hlm. 4-6.

sehingga telah mempropaganda umat Islam agar tidak membayar zakat sehingga mereka diperangi oleh Khalifah. Peristiwa ini dikenal dalam sejarah dengan sebutan perang *Riddah*.

Demikian juga pada zaman Khalifah Ali bin Abi Talib dengan munculnya gerakan anti Ali yang disebut dengan Khawarij dan kelompok Syiah yang terlalu membela Ali hingga mengkafirkan orang lain sesama Islam. Karena itu dalam sejarah Islam dijumpai sejumlah *firqah* (kelompok) hingga 73 golongan. *Firqah-firqah* tersebut terus melebar ke seluruh dunia Islam sehingga telah menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam.

Di India telah berkembang sebuah ajaran yang disebut dengan gerakan Ahmadiyah Qadhian yang dipelopori oleh Ghulam Ahmad. Ia mengukuhkan dirinya sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Gerakan ini telah masuk dan mengembangkan misinya di Indonesia sejak beberapa waktu yang lalu. Meskipun secara resmi pemerintah Indonesia telah menyatakan pelarangan terhadap ajaran Ahmadiyah ini, namun mereka tetap menjalankan misinya secara diam-diam. Hal serupa juga terjadi di Malaysia dengan berkembangnya aliran *Darul Arqam* yang sudah dinyatakan berpotensi mengganggu aqidah umat Islam sehingga telah dilarang keberadaannya di Malaysia. Aliran ini juga telah masuk dan telah menyebarkan pengaruhnya di Indonesia meskipun eksistensinya telah dilarang secara resmi.

Beberapa gerakan yang dipandang dapat membahayakan aqidah umat Islam yang berkembang di Indonesia, antara lain :

1. *Ajaran Inkaru as-Sunnah*

Gerakan ini muncul sekitar tahun 1980an yang berawal dari kelompok pengajian Qur'ani di sekitar Jakarta. Beberapa masjid digunakan sebagai sarana pengajian yang dipimpin oleh H Abdurrahman Pedurenan. Di samping memlalui kegiatan pengajian, penyebaran aliran inkar as-Sunnah ini juga dilakukan melalui karya tulis, khususnya melalui sejumlah buku yang ditulis oleh pemimpin mereka.

Di antara inti ajaran yang dipandang berbahaya bagi eksistensi aqidah umat Islam antara lain mereka menganggap bahwa azan dan iqamah itu tidak perlu dikerjakan karena keduanya tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Begitu juga dengan pelaksanaan shalat yang diseragamkan semuanya menjadi 2 (dua) rakaat.¹⁵ M.Amin Djamaluddin secara rinci menguraikan beberapa inti ajaran inkar as-Sunnah yang dipandang berbahaya bagi aqidah umat Islam, yaitu sebagai berikut :

- a. Tidak mempercayai Hadits Rasulullah secara utuh, karena menurut mereka Hadit itu diciptakan orang Yahudi untuk menghancurkan Islam.
- b. Dasar hukum dalam Islam hanyalah Al-Qur'an, tidak ada yang lain.
- c. Ikrar syahadat yang mereka yakini berbunyi *Isyhadu bi anna muslimin*, tidak sebagaimana yang diyakini oleh umat Islam kebanyakan.

¹⁵ Lihat Majalah *Media Dakwah*, edisi Jumadil Akhir 1422/ September 2001, hlm.33 – 34.

- d. Shalat dilakukan dalam bentuk yang beragam, ada yang dua rakaat ada pula yang cukup dengan *eling* saja.
- e. Ibadah puasa hanya diwajibkan bagi mereka yang melihat bulan saja, bila hanya seorang yang melihat bulan maka ialah yang harus berpuasa.
- f. Ibadah haji dapat dilakukan selama 4 bulan haram, yaitu pada bulan Muharram, Rajab, Zulkaidah dan Zulhijjah.
- g. Pakaian ihram adalah tradisi orang Arab yang sangat merepotkan, karena itu pada saat mengerjakan haji boleh menggantikannya dengan pakaian biasa, seperti baju kemeja, celana panjang, jas, dasi dan sebagainya.
- h. Rasul tetap diutus hingga hari kiamat.
- i. Nabi Muhammad tidak berhak menjelaskan tentang ajaran (isi kandungan) al-Qur'an.
- j. Orang yang meninggal dunia tidak wajib dishalatkan karena tidak diatur dalam al-Qur'an.¹⁶

Inkar as-Sunnah merupakan satu dari sekian banyak gerakan pemurtadan yang berkembang di Indonesia. Karena itu, gerakan ini patut diwaspadai keberadaannya meskipun saat ini pergerakan mereka mulai kurang tampak di permukaan.

2. Islam Jama'ah

Islam jamaah merupakan didirikan oleh Nurhasan Ubaidah Lubis. Awalnya jamaah ini bernama Darul Hadits yang telah berdiri sejak tahun 1951. Beberapa ajaranyang

¹⁶ M.Amin Djamaluddin, 2000, *Bahaya Inkar Sunnah*, LPPI, hlm.20 – 24.

dikembangkan melalui gerakan Darul Hadits ini telah mendapat respons keras dari masyarakat hingga telah dilarang keberadaannya, maka gerakan ini berganti nama menjadi Islam Jamaah.¹⁷

Selanjutnya aliran ini juga dilarang secara resmi melalui keputusan Jaksa Agung RI no.Kep-o8/D.A/10.197, tanggal 29 oktober 1971. Merasa kurang mendapat perlindungan maka para pemimpin mereka melakukan manuver politik dengan mendekati tokoh politik dan militer Indonesia, Ali Murtupo. Setelah memperoleh perlindungan dari Ali Murtupo maka Jamaah Islam ini berganti nama menjadi Lembaga Karyawan Dakwah Indonesia (Lemkari) Pada zaman orde baru dimana Golkar mendapat pengaruh besar dalam pemerintahan, maka Lemkari ini masuk menjadi salah satu bagian penting dalam Golkar.

Hartono Ahmad Jaiz menguraikan beberapa inti ajaran Islam Jamaah yang dinilai bertentangan dengan i'tiqa ahlussunah waljamaah sebagai berikut :

- a. Umat Islam di luar keleompok mereka dianggap sebagai kafir dan najis meskipun orang tuanya sendiri. Karena itu bila orang lain shalat di masjid mereka maka harus di sama'.
- b. Wajib taat kepada amir/ pimpinan dan bila meninggal dunia sebelum bai'at taat kepada amir maka dianggap sama dengan jahiliyah.

¹⁷ Media Dakwah, Op.Cit, hlm.35.

- c. Al-Qur'an dan Hadits yang boleh diikuti hanyalah yang keluar dari ucapam amir mereka selebihnya haram diikuti.
- d. Haram belajar al-Qur'an dan Hadist selain pada amir mereka.
- e. Orang berbuat dosa dapat ditebus oleh pimpinan mereka.
- f. Para pengikut wajib membayar zakat dan infak kepada pemimpin mereka dan haram diberikan kepada orang lain.
- g. Boleh mengambil harta orang lain di luar kelompok mereka asal tidak diketahui pemiliknya.
- h. Harta yang telah diberikan kepada amir, haram hukumnya untuk diaudit.
- i. Haram melakukan shalat di belakang imam selain imam mereka.
- j. Haram menikah dengan kelompok di luar mereka.¹⁸

Beberapa kriteria ajaran yang diungkapkan di atas nampaknya memang bertentangan dengan inti ajaran Islam yang dipahami oleh kebanyakan para ulama besar Islam. Karena itu eksistensi Lemkari ini patut diwaspadai sehingga tidak bisa berkembang dalam masyarakat Aceh.

3. Millata Abraham.

Problema sosial keagamaan yang ditelusuri melalui penelitian ini tertuju pada fenomena terakhir yang sedang dihadapi masyarakat Aceh yaitu munculnya aliran sesat, khususnya ajaran *Millata Abraham* yang dinilai telah mulai mengganggu kestabilan dan keharmonisan sosial masyarakat.

¹⁸ Hartono Ahmad Jaiz, Media Dakwah, Op.Cit, hlm.32

Sikap disharmonisasi sosial ini ditandai oleh adanya sikap saling mencurigai sehingga dapat merusak tatanan sosial yang ada dan dapat memecahbelahkan persatuan dan ukhwah Islamiyah masyarakat.

Millata Abraham merupakan fenomena terakhir yang berkembang di Indonesia, khususnya di Aceh. Beberapa waktu yang lalu seluruh masyarakat Aceh, khususnya di Banda Aceh merasa terusik oleh kemunculan gerakan millata Abraham yang diimami oleh sdr. Zainuddin. Ajaran ini dipandang sangat membahayakan aqidah umat Islam karena beberapa ajaran yang dibawakan itu bertentangan dengan i'tiqad ahlussunnah waljamaah yang telah diterima secara turun temurun oleh masyarakat Aceh.

Bagi masyarakat Aceh, i'tiqad ahlussunnah waljamaah merupakan sebuah i'tiqad yang benar dan bisa menghantarkan mereka menuju jalan lurus yang diridhai Allah. Karena itu bila muncul aliran yang bertentangan dengan inti ajaran Islam yang telah diyakini selama ini maka akan menimbulkan reaksi keras berupa penolakan. Inti penolakan masyarakat Aceh terhadap millata Abraham ini dilandasi oleh beberapa alasan sebagaimana tertuang dalam fatwa MPU Aceh nomor 04 tahun 2007 sebagai berikut :

- a. Mengingkari salah satu rukun Iman.
- b. Mengingkari salah satu rukun Islam.
- c. Meyakini dan mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan i'tiqad ahlussunnah waljamaah.

- d. Meyakini masih turun wahyu setelah al-Qur'an.
- e. Mengingkari kemurnian dan kebenaran al-Qur'an.
- f. Melakukan penafsiran al-Qur'an tidak berdasarkan kaidah ilmu tafsir.
- g. Mengingkari kedudukan Hadits sebagai sumber hukum/ajaran Islam.
- h. Melakukan pensyarah Hadits tidak berdasarkan kaidah mustalah Hadits.
- i. Menghina atau melecehkan Nabi dan Rasul.
- j. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi/ Rasul terakhir.
- k. Menghina atau melecehkan para sahabat Rasul SAW.
- l. Merubah, menambah atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat, seperti berhaji tidak perlu ke baitullah, shalat tidak mesti 5 waktu, dll.
- m. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i yang sah, seperti mengkafirkan kaum muslimin di luar kelompok mereka.

Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut, maka Millata Abraham diklaim oleh MPU sebagai gerakan yang dapat membahayakan aqidah umat Islam. Karena itu keberadaan organisasi ini di Aceh harus ditolak secara tegas. Penolakan secara sepihak oleh masyarakat tentu tidak memiliki pengaruh yang kuat bagi pertumbuhan dan perkembangan Millata Abraham di Aceh, akan tetapi bila penolakan ini dilakukan secara simultan antara masyarakat

dan pemerintah maka akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan, khususnya untuk melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap setiap ajaran baru yang terindikasi melecehkan syariat Islam.

E. Teori-Teori yang Relevan

Teori merupakan cerminan dari kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat.¹⁹ Karena itu teori memiliki peran penting dalam memahami dan menelaah berbagai fenomena yang terjadi dalam kehidupan sosial baik dalam bidang ekonomi, politik, agama, adat istiadat dan lain-lain. Salah satu persoalan sosial keagamaan adalah timbulnya gerakan pendangkalan aqidah dalam masyarakat Kota Banda Aceh. Karena itu, untuk memahami dan menganalisis problema pendangkalan aqidah tersebut maka digunakan 2 (dua) teori besar yaitu Teori Konflik dan Teori Struktural Fungsional. Penggunaan teori konflik terutama untuk memahami dan menganalisis motif munculnya pendangkalan aqidah, baik bersifat internal maupun eksternal. Sedangkan teori Struktural – Fungsional dipakai dalam rangka memahami dan menganalisis peran dan upaya-upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menanggulangi pendangkalan aqidah tersebut.

1. Teori Konflik

¹⁹ Zamroni, 1992, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta, hlm.3.

Istilah konflik dapat diartikan dengan pertentangan dua hal atau lebih yang saling berbeda. Konflik dapat saja menimbulkan dua dimensi yang berbeda, yaitu dimensi positif dan dimensi negatif. Karena itu, konflik tidak selalu identik dengan sesuatu yang negatif, akan tetapi juga mengandung hal-hal yang positif bagi kehidupan masyarakat. Pertarungan antara kejahatan dengan kebaikan selalu terjadi di sepanjang sejarah manusia. Setiap kejahatan (*al-munkar*) harus dihentikan dan digantikan dengan kebaikan (*al-ma'ruf*). Penegakan kebenaran tidak jarang harus berakhir dengan konflik. Karena itu konflik ini dipandang memiliki nuansa positif. Berkaitan dengan itu seorang ahli sosiologi, Paul Johnson, menyebut konflik sebagai suatu bentuk interaksi dan bagian dari dinamika sosial. Sebagai sebuah teori, konflik memiliki pengaruh besar dalam sejarah perkembangan teori-teori ilmu sosial. Secara teoritik, konflik merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Di sepanjang sejarah manusia selalu ditemui adanya fenomena konflik baik bersifat individual maupun kelompok. Pertentangan antara Qabil dan Habil merupakan awal realitas konflik yang mewarnai perjalanan hidup manusia.

Dalam studi ilmu sosiologi, pembahasan tentang teori konflik sering dihubungkan dengan Karl Marx, seorang ahli ekonomi yang sering membahas tentang kelas-kelas sosial, antara kaum borjuis dengan proletar. Kaum borjuis selalu menginginkan keuntungan yang lebih besar dari apa yang mereka usahakan, sedangkan kelompok proletar selalu menginginkan adanya

peningkatan gaji yang meningkat dari waktu ke waktu.²⁰ Perbedaan kepentingan ini telah menjadi pemicu lahirnya konflik dalam kehidupan masyarakat. Berpijak dari Teori Marx tersebut, dapat dipahami bahwa konflik akan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat bila di dalamnya terdapat sejumlah kepentingan yang berbeda-beda.

Dalam perspektif sosiologi agama, konflik tidak saja terjadi karena persoalan politik dan ekonomi semata-mata, akan tetapi juga terjadi dalam kehidupan beragama, terutama dikarenakan adanya perbedaan antara doktrin ajaran agama dengan realisasi terhadap doktrin itu.²¹ Perbedaan perilaku antara doktrin yang diyakininya dengan pengamalan yang jalankannya telah bisa dikategorikan sebagai wujud konflik bagi seseorang. Hendropuspito menguraikan beberapa aspek yang diyakini sebagai faktor pemicu lahirnya konflik dalam masyarakat, salah satunya adalah adanya perbedaan doktrin.²² Perbedaan ini telah memicu lahirnya sikap dan perilaku yang berbeda-beda sehingga ditemukan fakta tentang berbagai pertentangan yang terjadi atas alasan agama. Konflik ini dapat dilihat dalam dua dimensi, yaitu dimensi eksternal dan internal.

Perbedaan doktrin dan pemahaman agama juga telah menyebabkan lahirnya pertentangan di kalangan umat beragama, seperti persoalan *khilafiyah* yang sering muncul dalam

²⁰ Wardi Bachtiar, 2006, *Sosiologi Klasik : Dari Comte hingga Parsons*, Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm. 125.

²¹ Dadang Kahmad, *Op. Cit*, hlm.149.

²² Hendropuspito. D, 1983, *Sosiologi Agama*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 151.

masyarakat Islam. Tidak hanya itu, tetapi bermunculan pula sejumlah aliran yang didasarkan pada pemahaman agama yang berbeda-beda, seperti gerakan *Millata Abraham* yang mengklaim dirinya sebagai aliran agama yang benar sehingga telah menimbulkan reaksi di kalangan masyarakat.

Dalam perspektif Islam, suatu doktrin dan pemahaman agama baru dianggap benar bila disandarkan kepada Al-Qur'an Sunnah. Pemahaman keagamaan yang tidak dilandasi oleh kedua landasan itu dianggap sebagai sesuatu yang salah dan setiap kesalahan harus ditolak. Inilah yang menjadi prinsip dasar mengapa aliran *Millata Abraham* dan sejenisnya dianggap sesat dan bertentangan dengan ajaran Islam. Gerakan pendangkalan aqidah yang dimotori oleh *Millata Abraham* di Aceh dipandang telah melahirkan problema social tersendiri, yaitu telah mengganggu kenyamanan beragama dan beribadah yang selama ini dijalankan oleh masyarakat. Karena itu, aksi dan reaksi itu jelas merupakan bagian dari persoalan konflik. Dengan demikian, teori konflik ini digunakan terutama untuk mengungkap faktor-faktor penyebab timbulnya aliran sesat, khususnya *Millata Abraham* dalam masyarakat Aceh yang dipandang telah memicu timbulnya konflik sosial yang mengatasnamakan agama.

2. Teori Struktural – Fungsional

Emile Durkheim, seorang ahli sosiologi Perancis, dipandang cukup berjasa dalam membidani lahirnya teori fungsionalisme struktural melalui karya-karya klasiknya.

Menurut Durkheim, (dalam Margaret M Poloma), masyarakat modern disebutkan sebagai keseluruhan organis yang memiliki realitas tersendiri. Keseluruhan tersebut memiliki seperangkat kebutuhan atau fungsi-fungsi tertentu yang harus dipenuhi oleh bagian-bagian yang menjadi anggotanya agar tetap dalam kondisi normal dan langgeng, bila tidak maka akan berkembang suatu keadaan yang bersifat patologis.²³ Sehubungan dengan itu Judistira mengutip pendapat Radcliffe Brown bahwa teori struktural fungsional lebih banyak berbicara tentang peran dan fungsi yang terdapat dalam setiap lembaga. Ia mengatakan bahwa suatu lembaga itu akan berguna bila ia memiliki fungsi untuk memenuhi keperluan manusia.²⁴

Teori struktural fungsional dipandang sebagai teori penting dalam memahami dan menganalisis kehidupan masyarakat, terutama berkaitan dengan peran dan fungsi yang dimainkan oleh lembaga-lembaga tertentu. George Ritzer menyebutkan bahwa sasaran perhatian utama dari teori ini adalah struktur sosial dan institusi kemasyarakatan berskala luas, antar hubungannya dan pengaruhnya terhadap aktor.²⁵ Judistira K Garna menambahkan, secara maknawi struktur sosial dapat dimaknai dengan pola hubungan dalam setiap satuan sosial yang mapan dan memiliki identitas sendiri, sedangkan fungsi ialah

²³ Margaret M Poloma, 1987, *Sosiologi Kontemporer*, terj. Tim Yasogama, Rajawali Press, Yogyakarta, hlm.25.

²⁴ Judistira K. Garna, 1996, *Ilmu-Ilmu Sosial : Dasar – Konsep dan Posisi*, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm. 54.

²⁵ George Ritzer, 2004, *Teori Sosiologi Modern*, Terj. Alimandan, Prenada Media, Jakarta, 118.

sesuatu hal yang berfungsi atau yang berguna.²⁶ Ia menambahkan, teori ini mencoba menjelaskan tentang gejala-gejala sosial yang dibentuk dan disusun oleh gejala dan institusi sosial tersebut.

Pernyataan teoritik di atas menekankan pentingnya peran dan fungsi yang memainkan sebuah lembaga bagi pembentukan suatu komunitas sosial. Karena itu penelitian ini mengasumsikan, apabila peran dan fungsi suatu lembaga berjalan dengan baik, maka tatanan kehidupan sosialpun akan menjadi baik. Sebaliknya, apabila suatu lembaga tidak mampu menjalankan peran dan fungsinya secara baik maka disharmonisasi sosialpun akan dapat terjadi. Lembaga yang dimaksudkan dalam studi sini adalah lembaga pemerintahan, khususnya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menyikapi dan menanggulangi gerakan pendangkalan aqidah. Oleh karena itu, teori Struktural – Fungsional ini dipakai dengan maksud ingin mengungkap bagaimana keberadaan dan usaha-usaha Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menanggulangi gerakan pendangkalan aqidah dalam masyarakatnya.

Secara politis, aspek struktural dipandang memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi audient, sebab bagaimanapun juga pemerintah diakui memiliki sejumlah kekuatan yang dapat memudahkannya untuk mencapai target-target yang diinginkan. Karena itulah dengan kekuatan struktural dan fungsional yang dimilikinya sangat memungkinkan

²⁶ Judistira K. Garna, *Op.Cit*, hlm. 54.

Pemerintah untuk bergerak lebih leluasa dalam melakukan upaya-upaya penanggulangan terhadap gerakan yang membahayakan aqidah masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode adalah cara atau sejumlah langkah-langkah kerja yang digunakan dalam rangka mengumpulkan data atau informasi yang berkenaan dengan topik, masalah atau fokus utama suatu penelitian. Terdapat beberapa langkah penting yang patut diikuti ketika suatu penelitian ilmiah itu dilakukan, mulai dari memilih pendekatan yang digunakan, menentukan masalah dan fokus kajian, menyusun Instrumen Pengumpulan Data (IPD), menjelaskan teknik analisis data dan standar validitas data.

3.1. Pendekatan Penelitian.

Secara umum terdapat 2 (dua) jenis pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian, yaitu pendekatan deduktif kuantitatif dan pendekatan induktif kualitatif. Menurut Bungin dalam penelitian deduktif kuantitatif keberadaan teori menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, membangun hipotesis maupun melakukan pengamatan lapangan sampai dengan menguji data. Hal ini berbeda dengan penelitian dengan menggunakan pendekatan induktif kualitatif. Dalam penelitian ini, data-data lapangan menjadi sangat urgen dalam rangka memecahkan masalah penelitian. Menurut Burhan

Bungin dalam penelitian induktif kualitatif, data menjadi amat sangat penting, sedangkan teori akan dibangun berdasarkan temuan data di lapangan.²⁷

Mengingat data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa upaya pemerintah dalam menanggulangi pendangkalan aqidah, maka pendekatan kualitatif dipandang tepat untuk dilakukan. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, penelitian kualitatif (*Qualitative Research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual atau kelompok. Penelitian kualitatif juga mempunyai dua tujuan yang utama yaitu, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).²⁸

B. Fokus Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah di atas, maka disusunlah fokus penelitian dalam rangka mempermudah proses pengumpulan data. Adapun yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Fokus Pertama :

²⁷ Burhan Bungin, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.31.

²⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, 2005, *Metode Penelitian Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal 60

Fokus pertama yang ingin diteliti adalah menelusuri penyebab utama terjadinya pendangkalan aqidah di dalam masyarakat Kota Banda Aceh. Penyebab ini meliputi penyebab dari luar dan penyebab dari dalam itu sendiri.

2. *Fokus Kedua :*

Fokus kedua meliputi upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh dan jajarannya untuk menyikapi dan menanggulangi proses pendangkalan aqidah di kalangan masyarakat. Upaya-upaya tersebut dapat berupa program jangka pendek maupun jangka panjang.

3. *Fokus Ketiga :*

Fokus ketiga berkaitan dengan beberapa faktor pendukung yang dimiliki Pemerintah Kota Banda Aceh dalam proses penguatan aqidah dan juga beberapa faktor penghambat bagi suksesnya program tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kota Banda Aceh. Dalam rangka mengumpulkan data yang diperlukan, maka ditetapkan 2 (dua) lokasi sebagai sasaran untuk memperoleh informasi, yaitu di Kantor Walikota dan di Kantor Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. Penetapan kedua institusi tersebut sebagai lokasi penelitian didasari oleh alasan sebagai berikut :

1. Kantor Walikota.

Penetapan kantor/ sekretariat Kota Banda Aceh sebagai lokasi penelitian didasari oleh alasan bahwa

sekretariat Kota merupakan sentral institusi pemerintah tingkat Kabupaten/ Kota. Walikota merupakan orang yang memiliki otoritas dalam menentukan arah dan kebijakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk kesejahteraan dalam bidang kehidupan beragama.

2. Kantor Dinas Syariat Islam.

Secara struktural – institusional Dinas Syariat Islam merupakan perpanjangan tangan pemerintah untuk mengurus segala sesuatu berkenaan dengan penyelenggaraan syariat Islam, termasuk penguatan aqidah masyarakat Islam. Karena itu dalam menjalankan program kerjanya, Dinas Syariat Islam baik secara langsung atau tidak selalu berkaitan dengan Pemerintah Kota.

D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data.

1. Instrumen Penelitian.

Suharsimi Arikunto mengartikan instrumen penelitian sebagai alat yang dapat digunakan dalam rangka mengumpulkan data yang diinginkan. Menurutnya, penggunaan suatu instrument sangat ditentukan oleh teknik pengumpulan yang digunakan. Artinya, apabila pengumpulan data dilakukan dengan teknik test, maka soal test itu sendiri yang dijadikan sebagai instrumennya. Begitu juga bila pengumpulan data dilakukan melalui teknik angket, maka instrumennya adalah kuesioner itu sendiri.

Demikian juga halnya ketika proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik interview, maka instrumennya adalah pedoman wawancara dan interviewer itu sendiri.²⁹

Namun Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti dipandang sebagai bagian dari instrument penelitian itu sendiri. Lexy J Moleong menyebutkan bahwa ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperanserta, namun peranan penelitalah yang menentukan keseluruhan scenario dari aktivitas penelitian. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit karena peneliti terlibat secara aktif dalam seluruh proses penelitian. Peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data dan pada akhirnya ia sendiri menjadi pelopor terhadap hasil penelitiannya.³⁰ Karena itu peneliti disebut dengan instrument penelitian karena ia terlibat secara keseluruhan dalam proses penelitian.

Menurut Moleong, penetapan manusia (peneliti) sebagai instrumen penelitian didasari atas beberapa pertimbangan, antara lain :

- a. Manusia memiliki sikap responsif dan interaktif terhadap lingkungan yang ada baik lingkungan alam maupun lingkungan masyarakat.
- b. Manusia sebagai instrumen dapat menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi pengumpulan data.

²⁹ Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.149.

³⁰ Lexy J Moleong, 1997, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet.VIII, Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm.168.

- c. Dapat mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan. Kemampuan ini diperoleh peneliti saat melakukan praktek lapangan berupa aktivitas penelitian.
- d. Manusia dapat memproses data dalam waktu yang relatif singkat. Artinya, setiap data yang telah diperoleh disusun kembali dalam bentuk pernyataan-pernyataan sehingga memudahkan dirinya untuk menyusun kesimpulan-kesimpulan.³¹

Sehubungan dengan pernyataan Moleong di atas, maka instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang secara aktif mengumpulkan berbagai data yang terkait dengan berpedoman kepada pedoman wawancara (*interview guide*). Selain itu instrumen bantu juga dipergunakan untuk membantu proses pengumpulan data seperti *tape recorder*, kamera, Buku catatan, ballpoint dan instrumen lain yang terkait.

2. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam suatu penelitian dijumpai beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Penggunaan teknik pengumpulan data tersebut terkait erat dengan pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka terdapat 3 (tiga) teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam pendekatan ini, yaitu wawancara mendalam (*depth-interview*),

³¹ Ibid, hlm.169 – 170.

Pengamatan (Observasi) dan studi Dokumentasi. Ketiga teknik tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Wawancara Mendalam (Indepth-Interview).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara (interview) khususnya melalui *indepth interview*. Moleong merumuskan pengertian wawancara dengan suatu percakapan yang dibangun antara pewawancara (*interviewer*) dengan yang diwawancarai (*interviewee*) untuk suatu maksud dan tujuan tertentu.³² Dalam mengumpulkan data dijumpai beberapa macam wawancara sebagaimana diuraikan oleh Guba dan Lincoln (dalam Moleong) antara lain wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada *interviewee*.³³ Wawancara ini biasanya digunakan untuk menemukan jawaban atas hipotesis kerja. Karena itu setiap pertanyaan disusun secara rapi dan ketat. Jenis ini dilakukan pada situasi jika sejumlah sampel yang representatif ditanyakan dengan pertanyaan yang sama dan semua orang (*interviewee*) mendapatkan kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang sama.

Sedangkan wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan untuk menemukan informasi yang bukan baku. Wawancara ini berbeda dengan wawancara

³² Ibid, hlm.186.

³³ Ibid, hlm.190.

terstruktur terutama pada aspek waktu dan cara memberikan respons. Respondenpun biasanya terdiri dari mereka yang terpilih saja dengan mempertimbangkan kualifikasi pengetahuan tentang objek yang diteliti sehingga mereka dipandang lebih memahami tentang informasi yang dibutuhkan peneliti. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga tidak disusun secara ketat sebelumnya, akan tetapi disesuaikan dengan kondisi dan ciri-ciri unik yang dimiliki responden sehingga terlihat lebih santai. Wawancara ini dapat berlangsung dalam durasi waktu yang agak lama dan berulang-ulang sehingga *interviewer* benar-benar menenukan situasi dan informasi yang dibutuhkannya.

Mengingat *interviewee* yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari orang-orang yang terpilih, maka wawancara tak terstruktur akan mewarnai proses pengumpulan data dalam penelitian ini. Para responden yang diwawancarai terdiri dari Wakil Walikota Banda Aceh, Kabag Keistimewaan Kota Banda Aceh dan representasi staf/ karyawan yang dianggap mampu memberikan kontribusi pemikiran dan penjelasan tambahan berkenaan dengan upaya Pemerintah dalam menanggulangi pendangkalan aqidah.

Wawancara juga dilakukan dengan Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Kepala Bidang (Kabid) Bina Ibadah dan Muamalah serta Kepala Bidang (Kabid) Dakwah. Di samping aktivitas wawancara dengan wakil Walikota dan di Dinas Kepala Syariat Islam, wawancara juga dilakukan dengan

beberapa tokoh masyarakat Kota Banda Aceh, antara lain tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan. Wawancara ini dipandang penting dalam rangka memperkaya informasi berkenaan dengan upaya pemerintah dalam menanggulangi persoalan keagamaan di Kota Banda Aceh.

b. Pengamatan (Observasi).

Selain wawancara mendalam, pengamatan (observasi) juga dipandang perlu dilakukan dalam rangka mendapatkan data yang diperlukan. Observasi sering dikaitkan dengan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindera yang ada seperti mata, telinga, hidung dan sebagainya. Karena itu Bungin merumuskan arti observasi dengan kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui aktivitas pancaindera manusia dalam rangka menghimpun data yang diperlukan dalam suatu kegiatan penelitian.³⁴

Secara umum terdapat dua jenis observasi yang sering digunakan dalam proses pengumpulan data penelitian, yaitu observasi partisipasi (*participant observation*) dan observasi non partisipasi (*non-participant observation*). Mengingat observasi yang dilakukan dalam penelitian ini terfokus pada aktivitas kelembagaan, yaitu Pemerintah Kota, maka bentuk observasi yang dilakukanpun cenderung mengikuti kedua teknik observasi di atas. Karena itu teknik observasi setengah

³⁴ Burhan Bungin, 2010, *Penelitian Kualitatif*, Cet.IV.Kencana, Jakarta, hlm.115.

partisipan dipandang dapat dilakukan dalam rangka mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Karena itu, sasaran utama observasi ini meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pemerintah berkaitan dengan penguatan aqidah masyarakat.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sering dipakai dalam penelitian-penelitian sosial. Burhan Bungin mengatakan bahwa pada dasarnya, studi dokumentasi ini merupakan suatu metode yang digunakan dalam penelitian sejarah, namun kemudian cara ini digunakan juga dalam dalam studi ilmu-ilmu sosial sebagai alat atau teknik dalam mengumpulkan data. Hal ini dikarenakan bahwa sebagian data-data yang diperlukan dalam penelitian sosial tersimpan di dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.

Bungin menambahkan bahwa data yang tersimpan di dalam dokumen itu dapat berupa surat-surat, catatan harian, laporan dan sebagainya. Menurutnya, sifat dasar dari data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu, sehingga member peluang bagi para peneliti untuk mengetahui berbagai peristiwa yang pernah terjadi pada masa silam. Istilah dokumentasi mengandung makna yang sangat luas, termasuk di dalamnya

foto, artefak, tape, microfilm, disk, flashdisk, CD dan lain-lain.³⁵

Moleong membagi istilah dokumentasi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu dokumentasi pribadi dan dokumentasi resmi. Dokumentasi pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis mengenai tindakan, pengalaman dan kepercayaannya terhadap sesuatu. Dokumentasi pribadi ini dapat diperoleh antara lain melalui buku harian, surat-surat pribadi maupun otobiografi. Sedangkan dokumentasi resmi terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu dokumentasi internal dan dokumentasi eksternal.

Dokumentasi internal dapat berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga yang digunakan untuk kalangan sendiri, keputusan pimpinan kantor dan lain-lain. Sedangkan dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, seperti majalah, jurnal, bulletin, pernyataan dan berita-berita yang disiarkan kepada media massa. Dokumen eksternal ini dapat dimanfaatkan untuk menelaah konteks sosial, kepemimpinan dan sebagainya.³⁶

Mengingat penelitian dilakukan di lembaga pemerintahan, maka sedapat mungkin memanfaatkan dokumentasi resmi baik yang bersifat internal maupun

³⁵ Ibid, hlm.121 - 122.

³⁶ Lexy J Moleong, Op.Cit, hlm.117 - 119

eksternal sebagai salah satu cara untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Data-data dokumentasi itu dapat berupa Surat Keputusan yang dikeluarkan baik oleh Walikota maupun Kepala Dinas Syariat Islam. Di samping itu data tentang letak Geografis Daerah, keadaan penduduk, keadaan Pegawai, dan struktur organisasi dan tata kerja juga dapat diperoleh melalui studi dokumentasi ini.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan pemaknaan dan penafsiran terhadap informasi atau data yang diperoleh selama proses pengumpulan data berlangsung. Analisis data memainkan peranan penting dalam rangka mendapatkan temuan dan merumuskan kesimpulan penelitian. Kesalahan dalam melakukan analisis data dapat menyebabkan atau melahirkan kesimpulan yang salah sehingga derajat kepercayaan terhadap hasil penelitianpun menjadi rendah. Burhan Bungin menjelaskan bahwa ditinjau dari tujuan analisis, maka terdapat 2 (dua) hal yang ingin dicapai, yaitu *Pertama*, menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut. Proses ini adalah berupaya mengungkapkan semua proses etik yang ada dalam suatu fenomena sosial dan mendeskripsikan kejadian proses sosial itu apa adanya sehingga tersusun suatu pengetahuan yang sistematis mengenai proses sosial, realitas sosial dan semua atribut dari fenomena sosial itu.

Kedua, menganalisis makna yang terdapat dibalik informasi, data, dan proses suatu fenomena sosial itu. Proses ini merupakan upaya mengungkapkan berbagai peristiwa emik dan kebermaknaan fenomena sosial itu dalam pandangan objek – subjek sosial yang diteliti, sehingga terungkap suatu gambaran emik terhadap suatu peristiwa sosial yang sebenarnya dari fenomena-fenomena sosial yang nampak.³⁷

Lexy J Moleong menyebutkan bahwa analisis data merupakan upaya menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik dari wawancara, pengamatan, catatan-catatan di lapangan, serta dokumen-dokumen yang ada, seperti gambar, foto, rekaman dan lain-lain. Secara konseptual Moleong mengutip penjelasan Bogdan dan Biklen yang menyebutkan bahwa analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data berupa mengorganisasikan data, memilah data menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola menemukan apa yang penting dipelajari dan memutuskan apa saja yang perlu diceritakan kepada orang lain.³⁸

Adapun tahapan-tahapan analisis data menurut Moleong adalah sebagai berikut :

1. Tahap *reduksi* data

Tahap ini diawali dengan melakukan identifikasi setiap satuan dengan cara melakukan abstraksi, yaitu berupa usaha membuat rangkuman yang inti.. Pada awalnya

³⁷ Burhan Bungin, *Op.Cit*, hlm.153.

³⁸ Lexy J Moleong, *Op.Cit*, hlm. 247 – 248.

diidentifikasi adanya satuan yang merupakan bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan masalah penelitian. Setelah satuan itu diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah membuat koding dengan cara memberikan kode pada setiap satuan agar setiap data dapat ditelusuri sumbernya.

2. Kategorisasi data

Kategorisasi data adalah upaya memilah dan menyusun kembali setiap satuan data ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan dengan cara memberi nama atau label.

3. Sintesisasi data

Mensintesis data berarti mencari hubungan antara satu kategori dengan kategori yang lain. Kaitan antara satu kategori dengan kategori lainnya juga akan diberikan label atau nama.

4. Penyusunan Proposisi

Proposisi disebut juga dengan hipotesis kerja yang berupaya memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Penyusunan proposisi merupakan rumusan suatu pernyataan yang bersifat proposisional sehingga membentuk pernyataan berupa teori substantif.³⁹

Garna juga berpendapat sama bahwa analisis data merupakan upaya pengolahan terhadap data. Sebelum data dianalisis terlebih dahulu dilakukan pengolahan dan

³⁹ Ibid, hlm.288

pengelompokan sehingga memudahkannya untuk dianalisis. Kegiatan analisis data meliputi editing, koding dan tabulasi. Keduanya sepakat bahwa analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti, dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Mereka menyebutkan beberapa teknis dan langkah analisis data yaitu :

1. Editing, yaitu melakukan pengolahan data dengan cara mengedit data dalam rangka memastikan data itu sudah lengkap/ sempurna atau belum.
2. Pengkodean, yaitu pemberian kode-kode tertentu bagi setiap data sehingga memberikan kemudahan dalam melakukan pengelompokan data.
3. Tabulasi, yaitu mengelompokkan data sesuai kelompok masing-masing, seperti data wawancara dengan informan dan responden utama (*key informan*).⁴⁰

F. Validitas Data

Kevalidan sebuah penelitian sangat ditentukan oleh kebenaran data. Sebuah data dianggap benar (valid) bila didapat dari sumber yang benar pula. Karena data yang dikumpulkan dalam penelitian ini lebih banyak diperoleh dari informan dan hasil pengamatan peneliti, maka informasi yang diperoleh dari sumber data akan dilakukan *cross chek* tentang derajat kepercayaan yang diberikan informan. Karena itu untuk menemukan kavalidan data, maka semua data yang sudah

⁴⁰ Judistira K Garna, *Op.Cit*, hlm.114.

dikumpulkan dipilah sesuai dengan pengelompokannya, baik konsep maupun kriterianya dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik Triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dapat ditambahkan bahwa triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan yang ada. Dengan kata lain, melalui triangulasi peneliti dapat *recheck* temuannya dengan cara membandingkannya dengan berbagai sumber, metode atau teori.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis.

Kota Banda Aceh merupakan sebuah kota yang terletak di ujung barat pulau Sumatera. Pada masa zaman Kesultanan Kota Banda Aceh disebut dengan nama *Koeta Radja*. Penyebutan ini berkaitan erat dengan posisi kesultanan Aceh yang berkedudukan di Banda Aceh. *Koeta Radja* atau Banda Aceh diperkirakan telah didirikan sekitar tahun 1205 M, karena itu kini usianya sudah mencapai 809 tahun. Namun istilah *Koeta Radja* telah lama ditinggalkan dan diganti dengan sebutan Banda Aceh. Sejak pasca kemerdekaan Republik Indonesia keberadaan kota Banda Aceh tidak saja sebagai pusat Pemerintahan tingkat kota, akan tetapi juga sebagai pusat ibu kota Propinsi.

Untuk mengenal lebih dekat profil Kota Banda Aceh maka dipandang perlu untuk diuraikan secara garis besar kondisi umum Kota Banda Aceh, baik dari aspek geografis, keadaan penduduk, agama maupun adat istiadat. Dalam buku Banda Aceh dalam Angka disebutkan bahwa secara geografis posisi Kota Banda Aceh terletak antara 05° 16' 15" – 05° 36' 16" lintang

utara dan $95^{\circ} 16' 15'' - 95^{\circ} 22' 35''$ bujur timur dengan ketinggian rata-rata 0,80 meter di atas permukaan laut.⁴¹

Kota Banda Aceh awalnya hanya terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan saja, yaitu Kecamatan Meuraxa, Kecamatan Baiturrahman dan Kecamatan Kuta Alam. Namun seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan tata kota, maka terjadilah pemekaran Kecamatan. Karena itu saat ini Kota Banda telah berkembang menjadi 9 Kecamatan dan 90 *gampong* (desa). Kecamatan yang masuk ke dalam wilayah Kota Banda Aceh adalah Kecamatan Meuraxa, Jaya Baru, Bandar Baru, Banda Jaya, Baiturrahman, Lueng Bata, Kuta Alam, Kuta Raja, Syiah Kuala dan Ulee Kareng.

Menurut data statistik Kota Banda Aceh tahun 2012 disebutkan, wilayah Kota Banda Aceh memiliki luas areal 61,36 Km². Jumlah tersebut terbagi ke dalam 9 Kecamatan dan 90 *Gampong* (desa). Kota Banda Aceh berbatasan langsung dengan selat Melaka di sebelah utara, Kabupaten Aceh Besar di sebelah selatan dan timur serta samudera Indonesia di sebelah barat (Banda Aceh dalam Angka : 2012 :2). Adapun gambaran wilayah Kota Banda Aceh dapat dilihat dalam peta sebagai berikut :

⁴¹ Tim Penyusun, 2012, *Banda Aceh Dalam Angka*, BPS Kota Banda Aceh, hlm.1.

Gambar 1 :
Peta Kota Banda Aceh



Sumber : Diolah dari data dokumentasi sekretariat Kota Banda Aceh.

Penyebaran penduduk di kawasan Kota Banda Aceh dapat dikatakan sudah sangat merata. Mereka terkonsentrasi di setiap Kecamatan dan *Gampong* yang ada. Adapaun nama-nama Kecamatan dan *Gampong* yang masuk dalam wilayah Kota Banda Aceh dapat dilihat secara jelas dalam tabel berikut :

Tabel 1:
Jumlah *Gampong* Menurut Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Jumlah <i>Gampong</i>
1.	Meuraxa	16
2.	Jaya Baru	9
3.	Banda Raya	10
4.	Baiturrahman	10
5.	Lueng Bata	9
6.	Kuta Alam	11
7.	Kuta Raja	6
8.	Syiah Kuala	10
9.	Ulee Kareng	9

Jumlah	90
--------	----

Sumber : diolah dari data BPS Kota Banda Aceh.

Dari sudut pandang sejarah, Banda Aceh dikenal sebagai kota yang penuh dengan torehan sejarah, baik sebagai pusat pemerintahan, pusat pergerakan politik, benteng pertahanan pada masa penjajahan, pusat peradaban dengan masjid raya sebagai icon terbesarnya juga sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan, terutama pada abad ke-17 hingga menjelang abad ke-19. Segera setelah Indonesia merdeka, Banda Aceh masih menoreh sejarah baru di dunia pendidikan, yaitu dengan lahirnya 2 (dua) Perguruan Tinggi (*Twin Campus*) yang disebut-sebut sebagai 2 (dua) kampus jantung hati rakyat Aceh, yaitu Universitas Syiah Kuala dan UIN Ar-Raniry yang berkedudukan di Kota Pelajar dan Mahasiswa (Kopelma) Darussalam.

Pada masa konflik Aceh, Kota Banda Aceh dan beberapa daerah lain di Aceh nyaris tidak dikenal sama masyarakat luas, karena atas alasan konflik dan keselamatan, seluruh kawasan di Aceh dinyatakan tertutup bagi masyarakat luar. Namun pasca peristiwa gempa dan tsunami yang menimpa Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 seluruh daerah Aceh menjadi kawasan yang terbuka bagi masyarakat dunia, sehingga tidak sedikit wisatawan, baik lokal maupun mancanegara yang menyempatkan diri datang ke Aceh, khususnya ke Banda Aceh.

Selain sebagai ibu kota Provinsi Aceh, Banda Aceh juga merupakan kota sejarah. Beberapa situs sejarah masih

terpelihara dengan rapi, seperti Kherkoff, yaitu kuburan Belanda korban perang Aceh, Rumah adat Aceh (*rumoh Aceh*), Lonceng *Cakra Donya*, yaitu sebuah lonceng pemberian dinasti Ming kepada Kerajaan Aceh, duplikat Pesawat terbang pertama di Indonesia, Masjid Raya Baiturrahman dan kampus kembar (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Universitas Syiah Kuala) di Kopelma Darussalam. Pasca tsunami, beberapa situs baru juga dibangun oleh pemerintah seperti Museum Tsunami, Kapal Apung dan lain-lain. Objek-objek wisata tersebut menjadi modal untuk menarik perhatian dan minat para wisatawan asing untuk datang ke Aceh, apa lagi Kota Banda Aceh sempat mengusung visi sebagai kota bandar wisata islami Indonesia, khususnya periode 2007 – 2012 yang lalu.

Mawardi Nurdin yang juga Walikota Banda Aceh periode ke-II saat ini, menguraikan bahwa ditinjau dari sisi kondisi Geomorfologis wilayah Kota Banda Aceh terletak di atas formasi batuan (vulkanis tertier), terutama di sekitar gunung Seulawah dan Pulau Breuh, juga formasi batuan sedimen, formasi endapan batu di sepanjang krueng Aceh, formasi kapur di bagian timur, formasi batuan vulkanis tua berlipat dan formasi batuan dalam. Ia menambahkan bahwa secara geologis Kota Banda Aceh diapit oleh dua patahan di wilayah barat dan timur, yaitu patahan Darul Imarah dan Darussalam, sehingga Banda Aceh merupakan suatu daratan hasil amblasen sejak sejak *Pilosen* membentuk suatu *Graben*. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruas-ruas patahan Semangko di Pulau Sumatera dan kedudukannya terhadap Kota

Banda Aceh, dimana kedua patahan yang merupakan sesar aktif tersebut diperkirakan bertemu pada pegunungan di sebelah tenggara, sehingga daratan Banda Aceh merupakan batuan sedimen yang berpengaruh kuat apabila terjadi bencana gempa bumi di sekitarnya. Gambaran tersebut diperkirakan karena letak Kota Banda Aceh yang berada di posisi paling ujung dari sebuah pulau besar.⁴²

Sebagai ibu kota Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh dituntut untuk mampu membenah diri dalam berbagai sektor pembangunan, baik berupa pembangunan fisik maupun non-fisik, khususnya – berkaitan dengan penelitian ini adalah – pembangunan dan penguatan syariat Islam sehingga menjadi model bagi daerah Kabupaten/ Kota lain di Aceh. Karena itu pemahaman tentang visi dan misi Kota Banda Aceh dipandang perlu untuk dicantumkan dalam penelitian.

2. Visi dan Misi Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh saat ini dipimpin oleh pasangan yang sama dengan periode sebelumnya, yaitu Ir.Mawardy Nurdin dan Hj Illiza Sa'aduddin Djamal, SE masing-masing sebagai Walikota dan wakil Walikota Periode 2012 – 2017. Untuk masa kepemimpinan kedua ini, Pemerintah Kota Banda Aceh mengusung visi dan misi sebagai berikut :

Visi :

⁴² Mawardi Nurdin, 2011, *Strategi Membangun Kota Banda Aceh Berbasis Kompetensi*, Indomedia Global, Jakarta, hlm.171 – 173.

Pemerintah Kota Banda Aceh masa kepemimpinan tahun 2012 – 2017 mengusung visi “Banda Aceh Model Kota Madani”

Misi :

Berpijak dari visi di atas, Pemerintah Kota Banda Aceh telah merumuskan beberapa misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pengamalan agama menuju Pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah*.
2. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Memperkuat ekonomi kerakyatan
4. Menumbuhkan masyarakat yang berintelektualitas, sehat dan sejahtera, yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
5. Melanjutkan pembangunan infrastruktur pariwisata yang islami
6. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah public dan perlindungan anak.
7. Meningkatkan peran generasi muda sebagai kekuatan pembangunan kota.⁴³

Dari ketujuh misi yang diemban oleh pemerintah Kota Banda Aceh, misi pertama yaitu tentang pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah* berkaitan langsung dengan penelitian ini. Di lihat dari visi dan misi, maka dapat dikemukakan bahwa pemerintah memiliki keinginan yang kuat (*goodwill*) untuk menyukseskan pelaksanaan Syariat Islam di kalangan

⁴³ Hasil studi dokumentasi di sekretariat Kota Banda Aceh.

masyarakat. Keinginan ini merupakan salah satu peluang yang harus dapat dimanfaatkan oleh elemen masyarakat lain dalam memperkuat aqidah umat Islam.

3. Keadaan Penduduk

Secara umum kehidupan masyarakat Kota Banda Aceh hingga saat ini berlangsung dalam kondisi aman, damai dan kondusif. Bahkan ketika konflik berkepanjangan menerpa Aceh secara keseluruhan, Kota Banda Aceh termasuk salah satu kawasan yang lumayan kondusif. Secara kesukuan, penduduk Kota Banda Aceh termasuk kategori masyarakat yang berpenduduk heterogen, meskipun dominasi etnik Aceh cukup terasa, seperti heterogenitas suku, adat maupun agama. Secara kesukuan hidup pula sejumlah suku lain seperti suku Jawa, Padang, Batak, dan lain-lain, begitu juga dengan heterogenitas agama, seperti penganut agama Islam, Katolik, Protesten, Hinda dan Budha. Meskipun pemeluk Islam berada dalam posisi mayoritas tapi kehidupan pemeluk agama lain cukup terjamin dan mereka bebas menjalankan rutinitas agama yang mereka yakini.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh yang tertuang dalam buku Banda Aceh dalam Angka disebutkan bahwa jumlah penduduk Kota Banda Aceh sampai tahun 2011 sebanyak 228.562 jiwa.⁴⁴ Jumlah tersebut tersebar di dalam 9 Kecamatan, yaitu (1) Kecamatan Meraxa; (2) Kecamatan Jaya Baru; (3) Kecamatan

⁴⁴ Tim Penyusun, 2012, Banda Aceh Dalam Angka, Op.Cit, hlm.43

Banda Raya; (4) Kecamatan Baiturrahman; (5) Kecamatan Lueng Bata; (6) Kecamatan Kuta Alam; (7) Kecamatan Kuta Raja; (8) Kecamatan Syiah Kuala dan (9) Kecamatan Ulee Kareng. Gambaran tentang tingkat banyaknya penduduk dan rata-rata kepadatan penduduk di masing-masing Kecamatan dan desa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 :

Banyaknya Penduduk, Rata-Rata Kepadatan Penduduk/ desa dan kepadatan penduduk/ km² pada tahun 2011

No.	Kecamatan	Jlh Penduduk (jiwa)	Rata-Rata Kepadatan Penduduk	
			Per Desa	Per Km ²
1.	Meuraxa	16.861	1.054	2.322
2.	Jaya Baru	22.535	2.504	5.962
3.	Banda Raya	21.369	2.137	4.461
4.	Baiturrahman	31.073	3.107	6.844
5.	Luang Bata	24.132	2.681	4.519
6.	Kuta Alam	43.184	3.926	4.297
7.	Kuta Raja	10.672	1.779	2.048
8.	Syiah Kuala	35.648	3.565	2.503
9.	Ulee Kareng	23.088	2.565	3.754
J u m l a h		228.562	2.540	3.725

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2012, hlm.45.

Dilihat dari aspek banyaknya jumlah penduduk dengan tingkat kepadatan tertinggi maka Kecamatan Kuta Alam menempati posisi pertama. Banyaknya penduduk di Kecamatan Kuta Alam diperkirakan oleh 2 (dua) hal, *Pertama* Kecamatan ini berada pada posisi strategis, yaitu di kawasan pusat Kota. *Kedua*, karena Kecamatan Kuta Alam menempati posisi kedua Kecamatan terluas. Kecamatan terluas dalam wilayah Kota Banda Aceh adalah Syiah Kuala, namun letaknya berada di sisi terluas dari pusat Kota, yaitu Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Besar, maka penduduknya menempati rangking ke-2.

Adapaun jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, ternyata kaum laki-laki lebih besar jumlahnya dari pada perempuan. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3 :
Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan		
1.	Meuraxa	9.131	7.730	16.861	118,12
2.	Jaya Baru	11.451	11.080	22.535	103,31
3.	Banda Jaya	10.800	10.569	21.369	102,19
4.	Baiturrahman	15.976	15.097	31.073	105,82
5.	Lueng Bata	12.372	11.760	24.132	105,20
6.	Kuta Alam	22.600	20.584	43.184	109,79

7.	Kuta Raja	5.671	5.001	10.672	113,40
8.	Syiah Kuala	17.869	17.770	35.648	100,51
9.	Ulee Kareng	11.862	11.226	23.088	105,67
J u m l a h		117.73 2	110.830	228.562	106,23

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2012, hlm.46.

Perkembangan penduduk Kota Banda Aceh dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Data statistik Kota Banda Aceh menyebutkan bahwa jumlah penduduk pada tahun selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan adanya pasang naik dan pasang surut. Kondisi ini dapat diperhatikan dalam tabel berikut :

Tabel 4 :
Pertumbuhan Jumlah Penduduk sejak tahun 2007 – 2011

No	Kecamatan	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Meuraxa	12.677	12.49 4	12.189	16.48 4	16.86 1
2.	Jaya Baru	20.138	20.65 8	20.127	22.03 1	22.53 5
3.	Banda Raya	21.376	20.90 7	20.352	20.89 1	21.36 9
4.	Baiturrah man	35.980	36.12 4	35.153	30.37 7	31.07 3
5.	Lueng	22.562	22.02	21.437	23.59	24.13

	Bata		5		2	2
6.	Kuta Alam	43.940	43.79 2	42.664	42.21 7	43.18 4
7.	Kuta Raja	8.068	8.076	7.890	10.43 3	10.67 2
8.	Syiah Kuala	34.012	33.43 3	32.433	32.56 4	34.85 0
9.	Ulee Kareng	20.906	20.40 9	19.865	22.57 1	23.08 8
J u m l a h		219.65 9	217.9 18	212.24 1	223.4 46	228.5 62

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2012, hlm.51.

Data di atas menunjukkan bahwa meskipun peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun mengalami pasang naik dan pasang surut, namun secara umum dapat dikatakan bahwa dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir telah terjadi peningkatan jumlah penduduk di Kota Banda Aceh sebanyak 8.903 orang atau mengalami peningkatan sebesar 96 %. Peningkatan jumlah penduduk tersebut diperkirakan masih terus bertambah dari tahun ke tahun. Secara sosiologis terdapat beberapa faktor pendorong terjadinya penambahan penduduk di Kota Banda Aceh, antara lain terjadinya urbanisasi dan tingginya angka kelahiran.

4. Agama dan Adat istiadat.

Sebagai sebuah Kota yang sedang berkembang, Banda Aceh memiliki tingkat keberagaman penduduk meskipun dalam kapasitas masih rendah. Keberagaman tersebut terlihat dari adanya penganut agama yang berbeda-beda seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Di samping perbedaan agama, Banda Aceh juga dihuni oleh etnik non Aceh yang memiliki adat istiadat sendiri, seperti orang Cina, Keling, Padang, Batak, Jawa, dan lain-lain. Meskipun etnik Aceh menempati posisi mayoritas dengan keyakinan terhadap agama Islam secara totalitas, namun suasana dan iklim interaksi antaretnik dan antaragama hingga saat ini masih berjalan secara baik.

a. Agama Masyarakat Kota Banda Aceh

Meskipun provinsi Aceh, tidak terkecuali Kota Banda Aceh, telah mendeklarasikan dirinya sebagai zona syariat Islam, tetapi tidak berarti bahwa Kota Banda Aceh seluruhnya ditempati oleh masyarakat Islam. Berdasarkan data yang ada dijumpai adanya sejumlah agama-agama selain Islam yang berkembang dengan baik di Aceh meskipun keberadaan mereka dalam posisi minoritas. Posisi minoritas yang dimiliki oleh etnik non-Aceh maupun non-Muslim yang mendiami wilayah Kota Banda Aceh tidak menyebabkan mereka menjadi orang-orang yang tertindas, akan tetapi mereka masih bisa menyesuaikan diri dengan kelompok mayoritas. Demikian juga sebaliknya, masyarakat Aceh memiliki sikap dan tradisi menghormati orang lain yang telah dipraktekkan secara turun

temurun sehingga semangat integrasi hingga saat ini masih terpelihara dengan baik.

Adapun untuk mengetahui jumlah penduduk menurut pemeluk agama dan keyakinannya masing-masing dapat diperhatikan dalam tabel berikut :

Tabel 5 :
Jumlah Penduduk berdasarkan pemeluk agama

N o	Kecamat an	Islam	Protes tan	Kato lik	Hind u	Bud ha	Juml ah
1.	Meuraxa	16.32 0	0	0	0	0	16.3 20
2.	Jaya Baru	22.07 7	8	0	0	0	22.0 85
3.	Banda Jaya	20.82 1	10	15	0	20	20.8 66
4.	Baiturrah man	30.03 8	68	161	4	218	30.4 89
5.	Lueng Bata	23.34 7	77	23	2	266	23.7 15
6.	Kuta Alam	39.44 9	468	161	4	2.05 2	42.1 34
7.	Kuta Raja	10.78 1	65	67	29	199	11.1 41
8.	Syiah Kuala	35.18 9	21	111	0	0	35.3 21
9.	Ulee	22.56	0	0	0	0	22.5

	Kareng	0					60
J u m l		220.5	717	538	39	2.75	224.
a h		82				5	631

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2012,
hlm.129.

Data tersebut memperlihatkan bahwa umat Islam menempati posisi mayoritas, yaitu mencapai 220.582 orang atau 98,20 % dan penganut agama Budha menempati peringkat ke-2 dengan jumlah 2.755 orang atau 1,1 %, seterusnya penganut Protestan sebanyak 717 orang atau 0,31 %, Katolik sebanyak 538 orang atau 0,23 % dan penganut agama Hindu sebanyak 39 orang atau 0,02 %. Meskipun menempati posisi mayoritas, umat Islam tetap menjaga kebebasan beragama dengan berbagai penganut agama lain meskipun dalam jumlah yang minoritas. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya konflik antar agama yang terjadi di sepanjang sejarah Aceh.

Data tersebut menginformasikan bahwa orang Aceh yang saat ini bertempat tinggal di Kota Banda Aceh, maupun di luar Kota Banda Aceh, semuanya menganut agama Islam. Hanya saja tingkat pemahaman dan pengetahuan mereka terhadap Islam masih sangat bervariasi, demikian juga tingkat ketaatan dalam menjalankan perintah agama masih sangat beragam. Di sisi lain, penduduk kota Banda Aceh tidak hanya ditempati oleh orang Aceh semata-mata, akan tetapi juga

dihuni oleh orang non-Aceh sehingga keadaan sosial masyarakatnya sangat bervariasi dan bersifat heterogen, baik heterogenitas agama, suku maupun budaya.

Secara keyakinan agama, orang-orang non-Aceh memiliki keyakinan agama yang berbeda-beda seperti yang terlihat dalam tabel 8 di atas, seperti Budha, Katolik, Protestan maupun Hindu. Berdasarkan kenyataan yang ada menunjukkan bahwa non muslim terbanyak yang mendiami wilayah Kota Banda Aceh adalah etnik Cina. Keberadaan etnik Cina di Banda Aceh sudah menjadi bagian dari masyarakat Aceh itu sendiri, meskipun dalam beberapa hal masih dijumpai adanya *stereotype* di antara kedua etnik ini.

b. Adat Istiadat

Adat istiadat adalah kebiasaan atau tradisi yang dipraktekkan masyarakat secara berulang-ulang dan cenderung diwariskan dari generasi ke generasi. Adat istiadat di samping menampilkan kebiasaan yang dilakukan masyarakat, juga menggambarkan watak dan perilaku masyarakat yang bersangkutan. Adat itu bersifat komprehensif tidak saja mengatur tata cara berbicara, berpakaian, bersikap akan tetapi melingkupi seluruh cara hidup dan cara pandang suatu masyarakat.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa adat istiadat yang dimiliki masyarakat Kota Banda Aceh hampir tidak berbeda dengan adat istiadat yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat Aceh lain yang berada di luar Kota Banda Aceh.

Hanya saja, mengingat penduduk Kota Banda Aceh pada umumnya terdiri dari kaum pendatang baik dari pesisir utara – timur, dari pesisir barat – selatan dan wilayah tengah Aceh, serta etnik non-Aceh lainnya, maka perkembangan adat dan budaya masyarakatnya pun nampak lebih terbuka dan dinamis.

Agama Islam yang berkembang dalam masyarakat kota Banda Aceh tidak saja meliputi persoalan aqidah dan ibadah saja, akan tetapi juga telah merambah ke dalam wilayah *mu'amalah*. Artinya, tidak sedikit dari ajaran agama yang telah dikejawantahkan ke dalam pola hidup dan pola budaya masyarakat. Misalnya, mengucapkan *assalamu'alaikum* saat bertemu dengan orang lain, di samping merupakan ajaran dan perintah agama Islam juga telah mentradisi di dalam kehidupan masyarakatnya. Karena itu nilai-nilai ajaran Islam banyak sekali dijumpai dalam kehidupan berbudaya mereka, sehingga antara agama dan budaya merupakan satu kesatuan yang bersifat integral dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Bagi masyarakat kota Banda Aceh – dan masyarakat Aceh pada umumnya – Islam merupakan agama yang telah diyakini kebenarannya dan telah pula dianut secara turun-temurun sehingga Islam telah menjadi bagian integral dari sistem sosial masyarakat Aceh. Karena itu, nilai-nilai ajaran Islam sering dijumpai dari praktek kehidupan mereka seperti praktek adat istiadat. Kondisi ini tercermin dalam falsafah hidupnya yang berbunyi :

“Adat bak Poteumeureuhom, hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak putroe Phang, Reusam bak Laksamana, Hukom ngon Adat Lagee Zat ngon Sifeut”.

Artinya,

Adat istiadat diatur oleh Raja/ Sultan, sedangkan hukum (Islam) diatur oleh Syiah Kuala (Syeikh Abdul Rauf As-Singkili, seorang ulama besar Aceh). Adapun aturan/ tata tertib dan protokoler istana diatur oleh Putri Pahang (permaisuri) dan strategi kemiliteran diatur oleh Laksamana (panglima). Karena itu hukum (Islam) dan Adat istiadat seperti zat dengan sifatnya.

Pengintegrasian ajaran Islam ke dalam adat istiadat masyarakat Aceh merupakan fakta sejarah dan hingga saat ini keberadaan masyarakat Islam di Kota Banda Aceh masih menempati posisi mayoritas. Karena itu penerapan syariat Islam bagi masyarakat Aceh pada saat ini merupakan pilihan yang sangat tepat dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang melanda masyarakat Aceh.

Meskipun pengaruh dan praktek adat Aceh yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Kota Banda Aceh nampak sangat dominan, namun tidak menghalangi semangat orang-orang non-Aceh untuk mengekspresikan adat dan kebudayaan mereka. Perilaku orang Aceh yang sangat terbuka memberikan peluang bagi etnik lain untuk mengembangkan adat istiadat mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, perayaan tari *Barongsai* yang dimainkan oleh orang-orang Cina justeru menjadi tontonan menarik bagi warga Kota Banda Aceh

yang berlatarbelakang muslim. Kondisi ini sekaligus menggambarkan bahwa toleransi agama yang dipraktekkan oleh masyarakat Kota Banda Aceh dapat disebut sudah berjalan secara baik.

B. Faktor Penyebab Timbulnya Gerakan Pendangkalan Aqidah

Gerakan sosial keagamaan yang mengatasnamakan Islam dapat saja muncul dalam masyarakat apapun, tanpa mempertimbangkan ruang dan waktu. Begitu pula dengan masyarakat Aceh yang dikejutkan oleh berkembangnya aliran *Millata Abraham* beberapa waktu yang lalu. Sepanjang penelusuran yang dilakukan hampir boleh dikatakan bahwa gerakan itu muncul bermaksud mengaburkan aqidah umat Islam dari *i'tiqad* yang benar Berdasarkan data yang diperoleh, agaknya gerakan pendangkalan aqidah umat Islam itu muncul dikarenakan beberapa faktor, antara lain :

1. Faktor dari Luar Umat Islam

Faktor ini berkaitan langsung dengan persoalan politik keagamaan yang datang dari orang-orang yang anti terhadap Islam di Aceh dan penegakan Syariat Islam dalam masyarakat Aceh. Kondisi ini juga telah disinyalir di dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 120 yang Artinya: *Orang yahudi dan Nasrani tidak senang kepada umat Islam sebelum umat Islam mengikuti millah (agama) mereka*. Gerakan ini diduga memang menginginkan agar pelaksanaan syariat Islam dalam masyarakat tidak dapat berjalan dengan baik. Dugaan

ini didukung oleh pengalaman sejarah yang dilakukan Snouck Horgroye yang mencoba melemahkan umat Islam Aceh dari dalam melalui proses pendangkalan aqidah.

Di sisi lain, muatan sosio-politik juga ikut berperan terutama untuk memecahbelahkan keutuhan masyarakat Aceh melalui agama. Perbedaan pemahaman terhadap ajaran Islam coba dikembangkan sehingga muncul sikap saling mencurigai di kalangan masyarakat. Pengalaman ini juga dirasakan dalam sejarah Aceh seperti konflik pemahaman agama antara Hamzah Fanshury dengan Nuruddin Ar-Raniry yang telah berdampak tidak baik bagi pengembangan agama dan ilmu pengetahuan di Aceh.

Berdasarkan fenomena tersebut dapat dikemukakan bahwa upaya pendangkalan aqidah yang terjadi di Aceh – khususnya di Kota Banda Aceh – akhir-akhir agaknya merupakan bagian tak terpisahkan dari scenario politik agama yang digerakkan oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab, baik dilakukan oleh kelompok non-Muslim maupun oleh orang-orang Islam itu sendiri yang belum memahami Islam secara komprehensif.

2. Faktor dari dalam umat Islam

Terjadinya pendangkalan aqidah dalam masyarakat Aceh tidak hanya karena faktor dari luar semata-mata, akan tetapi juga diakibatkan oleh faktor dari dalam masyarakat Aceh sendiri, antara lain : *Pertama*, Pemahaman masyarakat

terhadap inti ajaran Islam cenderung masih rendah. Secara kuantitas masyarakat muslim Kota Banda Aceh menempati posisi mayoritas, namun secara kualitas keberadaan masyarakat Islam masih belum menggembirakan. Pemahaman yang rendah terhadap Islam telah memberikan peluang bagi orang lain yang tidak senang terhadap Islam untuk mengacak-acak ajaran Islam dan masyarakatnya.

Kedua, Pengawasan melekat yang diberikan pemerintah Kota Banda Aceh terhadap pelaksanaan ajaran Islam agaknya masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini sangat berpengaruh bagi upaya perlindungan terhadap aqidah masyarakat. Artinya, makin kuat pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap pelaksanaan syariat Islam, termasuk penguatan aqidah maka akan semakin akan semakin terlindungi aqidah Islam masyarakat dari intervensi berbagai kelompok kepentingan.

Ketiga, peran organisasi Islam, baik ormas, orsospol maupun organisasi mitra pemerintah cenderung masih belum maksimal. Masuk dan berkembangnya aliran pendangkalan aqidah ke dalam masyarakat beberapa waktu yang lalu merupakan kecolongan besar bagi kaum ulama dan organisasi-organisasi berbasis Islam, seperti Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Washliyah dan lain-lain.

C. Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Pendangkalan Aqidah.

Dalam rangka memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat, termasuk perlindungan terhadap kemurnian aqidah mereka maka sudah selayaknya pemerintah Kota Banda Aceh memberikan perhatian khusus dan serius bagi upaya pembinaan masyarakat secara menyeluruh. Wujud perhatian Pemerintah terhadap pelaksanaan syariat Islam itu terlihat dalam visi dan misi yang diembangkannya. Untuk periode kedua, pasangan Mawardi – Illiza mengusung visi dan misi Kota Banda Aceh sebagai Kota Madani. Istilah masyarakat Madani itu merujuk pada sistem pemerintahan yang dibangun oleh Rasulullah SAW saat membangun negara Islam di Madinah.

Madinah merupakan sebuah kota dengan kondisi sosialnya yang sangat heterogen, baik heterogenitas suku maupun agama, namun dalam kondisi seperti ini Rasulullah mampu menunjukkan kelembutan Islam kepada semua orang. Karena itulah Islam makin dihormati oleh semua pihak. Menurut Komaruddin Hidayat dan Azyumardi Azra terdapat beberapa karakteristik masyarakat madani antara lain adanya kebebasan ruang publik dalam menyampaikan pendapat, tegaknya demokrasi, adanya sikap saling menghormati dan menghargai (toleran), keadaan sosial yang bersifat pluralis dan tegaknya keadilan sosial di dalam masyarakat.⁴⁵ Hal senada juga terungkap dalam wawancara dengan Illiza Sa'aduddin Djamal – wakil walikota Banda Aceh yang mengungkapkan bahwa :

⁴⁵ Komaruddin Hidayat dan Azyumardi Azra, 2006, *Pendidikan Kewargaan : Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, ICCE – UIN , Jakarta, hlm.315.

Penggunaan istilah masyarakat Madani dalam visi – misi pembangunan Kota Banda Aceh diambil dari peristiwa sejarah yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah. Beliau berhasil membangun suatu masyarakat ideal di Madinah yang dapat dijadikan contoh dalam rangka membangun masyarakat yang maju dan modern saat ini. Jadi menurut saya, masyarakat madani dapat ditandai dengan beberapa ciri-ciri utama seperti adanya semangat demokratis dalam kehidupan bermasyarakat, saling toleran dalam menyikapi berbagai perbedaan, dan rajin dalam melakukan ibadah kepada Allah. Jadi kita berhadap dan harus yakin bahwa apabila ciri-ciri masyarakat ideal yang dibangun oleh Rasulullah itu berhasil diwujudkan di Kota Banda Aceh, maka masyarakat Kota Banda Aceh akan dapat disebut sebagai masyarakat maju/ modern.⁴⁶

Informasi lain diperoleh dari wawancara dengan Mairul Hazami, Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, yang menguraikan bahwa masyarakat madani yang diwacanakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh merupakan fenomena menarik dalam proses sosialisasi syariat Islam di Kota Banda Aceh. Menurut saya, pencerahan yang dibawakan oleh Islam dan pemeluknya pada periode Madinah telah mampu memberikan kesejukan di hati setiap orang. Karena itulah Islam sangat cepat berkembang di Madinah dan menjadi pengayom bagi semua masyarakat yang ada, baik masyarakat Islam maupun non-Islam.

⁴⁶ Diolah dari hasil wawancara dengan wakil walikota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Jamal.

Kondisi inilah yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kota saat ini, sehingga Kota Banda Aceh betul-betul menjadi model bagi penyelenggaraan syariat Islam untuk Kabupaten/ Kota lainnya di Aceh. Karena itu Kota Banda Aceh menempati posisi strategis, terutama keberadaannya sebagai pusat ibu Kota Provinsi Aceh. Karena itu Banda Aceh menjadi pintu gerbang bagi perkembangan Islam di seluruh Aceh.⁴⁷

Dalam rangka mensosialisasikan syariat Islam, Pemerintah Kota berupaya membenah diri menuju kota Madani yang dicita-citakan. Untuk melakukan langkah-langkah seperti sosialisasi syariat Islam melalui Dinas Syariat Islam yang dilakukan secara terus menerus, melakukan pengawasan terhadap kawasan-kawasan yang berpotensi terjadinya pelanggaran syariat, melakukan pembinaan, dan penguatan masyarakat melalui pembentukan organisasi dakwah dengan tujuan membantu pemerintah dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Secara umum ditemukan sejumlah data berkenaan dengan upaya Pemerintah Kota dalam memperkuat aqidah Islamiyah masyarakat Kota Banda Aceh. Data tersebut dapat dirinci dalam 2 (dua) kategori, yaitu upaya-upaya struktural dan upaya kultural.

1. Upaya Struktural

⁴⁷ Data diolah dari hasil wawancara dengan bapak Mairul Hazami, SE,M.Si, Kadis Syariat Islam Kota Banda Aceh.

Upaya struktural merupakan suatu bentuk upaya politis yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam rangka mensosialisasikan Syariat Islam, terutama penguatan aqidah Islamiyah bagi masyarakat. Berdasarkan studi dokumentasi yang dilakukan di sekretariat Kota Banda Aceh diperoleh data mengenai upaya-upaya struktural baik berbentuk regulasi maupun kebijakan Pemerintah untuk memperkuat keberadaan Islam di Kota Banda Aceh. Kebijakan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Keluarnya Peraturan Daerah (perda) nomor 1 tahun 2002 tentang pembentukan organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh yang telah disahkan oleh DPRK pada tanggal 9 Januari 2002. Peraturan ini lahir sebagai bentuk konsekuensi logis terhadap amanat Undang-Undang nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh. Kehadiran MPU memiliki nilai politis – strategis bagi penguatan Islam dalam masyarakat, sebab bagaimanapun juga keterikatan emosional masyarakat Aceh terhadap kaum ulama dikenal sangat dekat.
- b. Dibentuknya Dinas Syariat Islam dan Keluarga Sejahtera Kota Banda Aceh pada tanggal 8 Mei 2004, yang selanjutnya menjadi Dinas Syariat Islam pada tahun 2008. Pembentukan Dinas Syariat Islam ini ditetapkan seiring dengan lahirnya Qanun Kota Banda Aceh nomor 9 tahun 2004. Tujuan pembentukan Dinas Syariat Islam ini adalah

sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mengurus, menyelenggarakan dan mensosialisasikan syariat Islam kepada masyarakat atas nama pemerintah.

- c. Dibentuknya Badan Amil zakat “Baitul Mal” berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota nomor 154 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kota Banda Aceh yang disahkan pada tanggal 30 Juni 2004. Lembaga ini dibentuk dalam rangka memperkuat ekonomi kerakyatan dan memberikan kesadaran bagi warga masyarakat untuk sadar zakat.⁴⁸

Di samping upaya tersebut, Illiza Sa’aduddin Jamal – wakil walikota – menyebutkan bahwa untuk melakukan penguatan aqidah, maka Pemerintah Kota secara khusus telah membentuk “*Komite Penguatan Aqidah dan Peningkatan Amal Ibadah*” (KPA – PAI). Pembentukan komite ini lebih merupakan sikap reaktif dan bentuk tanggung jawab Pemerintah untuk menyikapi berkembangnya aliran sesat di wilayah Kota Banda Aceh sehingga kenyamanan umat Islam dalam menjalankan agama dan keyakinannya tetap terpelihara dengan baik.⁴⁹

Sehubungan dengan data di atas, Ridwan Ibrahim (Kabid Dakwah) dan Bakhtiar (Kabid peribadatan dan Muamalah) Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh memberikan gambaran tentang upaya pemerintah dalam memperkuat aqidah. Menurut keduanya, di antara upaya yang ditempuh Pemerintah

⁴⁸ Studi dokumentasi di sekretariat Kota Banda Aceh.

⁴⁹ Disari dari hasil wawancara dengan ibu Illiza Sa’aduddin Jamal, Wakil walikota Banda Aceh

Kota Banda Aceh dalam memperkuat aqidah masyarakat antara lain telah mengeluarkan sejumlah aturan atau regulasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan syariat Islam dan penguatan aqidah. Regulasi tersebut berkenaan dengan pembentukan wadah/ organisasi yang mampu mengkomunikasikan program pemerintah tentang pelaksanaan syariat Islam kepada masyarakat. Atas dasar pemikiran ini maka lahirlah organisasi seperti :

1. Forum Komunikasi Pemerintah daerah (Forkopimda),
2. Komite Penguatan Aqidah dan Peningkatan Amal Ibadah (KPA – PAI),
3. Tim Amar Ma'ruf Nahi Mungkar (Tamar) Kota Banda Aceh,
4. Brigade Masjid, dan lain-lain.⁵⁰

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pada dasarnya Pemerintah Kota Banda Aceh telah memperlihatkan adanya *good will* atau i'tikad baik untuk mensukseskan syariat Islam dan menyelamatkan aqidah Islam masyarakat Kota Banda Aceh dari ancaman kelompok tertentu yang tidak senang terhadap Islam dan pelaksanaan Syariat Islam dalam masyarakat Aceh.

2. Upaya Kultural

Di samping upaya struktural, terdapat juga beberapa upaya kultural yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam rangka mensosialisasikan Syariat Islam dan memperkuat aqidah Islamiyah dalam masyarakat. Upaya kultural merupakan

⁵⁰ Disari dari hasil wawancara dengan Ridwan Ibrahim, S.Ag, M.Pd Kabid Dakwah dan Bakhtiar, S.Ag, MH Kabid Bina Ibadah dan Muamalah DSI Kota Banda Aceh.

pengerahan segenap kemampuan yang ada untuk menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi menegakkan syariat Islam baik dalam bidang aqidah, ibadah maupun muamalah. Upaya-upaya tersebut dapat dipahami dari beberapa studi dokumentasi yang ditulis oleh Mawardy Nurdin – walikota Banda Aceh saat ini. Mawardy mengungkapkan bahwa dalam rangka menegakkan komitmen menjalankan syariat Islam menuju masyarakat madani serta memperkuat aqidah Islamiyah, Pemerintah telah berupaya melakukan sejumlah langkah strategis antara lain :

- a. Membangun karakter masyarakat (*character building*) menjadi karakter yang islami, berperilaku jujur, amanah, toleran dan cerdas. Menurutnya, karakter masyarakat yang islami menjadi modal yang cukup besar bagi lepas landasnya pembangunan Aceh yang berkeadilan dan berkelanjutan.
- b. Membangun tradisi *uswatun hasanah* atau perilaku Islami di kalangan aparatur pemerintah baik di tingkat Kota hingga sampai ke tingkat pemimpin paling bawah. Sebab, pada dasarnya masyarakat membutuhkan *uswatun hasanah* atau keteladanan dari para pemimpin.
- c. Melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan syariat Islam kepada masyarakat secara terus menerus.
- d. Melakukan revitalisasi institusi keagamaan di tingkat *Gampong* seperti *Balee Seumeubeut* (balai pengajian), *Meunasah* (surau), dan majelis ta'lim. Penguatan peran institusi-institusi sosial keagamaan ini dinilai penting karena dalam keseharian masyarakat Aceh selalu bersinggungan

dengan institusi ini dan di lain pihak, karakter masyarakat akan lebih mudah dibentuk melalui kebiasaan sehari-hari.⁵¹

Berkaitan dengan itu, Zahrol Fajri menjelaskan bahwa dalam rangka mengantisipasi berkembangnya aliran sesat, sekaligus memperkuat basic aqidah masyarakat maka Pemerintah telah berupaya menggerakkan masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam melaksanakan syariat Islam secara kaffah. Pembentukan *Muhtasib Gampong* oleh Pemerintah Kota melalui Dinas Syariat Islam merupakan upaya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyelamatkan agama yang diyakininya.⁵²

Dalam rangka mempercepat proses sosialisasi ini, maka Pemerintah telah menempuh beberapa strategi yang bisa digunakan antara lain seperti dijelaskan oleh Mawardy Nurdin bahwa dalam rangka mempercepat proses sosialisasi syariat Islam dan penguatan aqidah Islamiyah kepada setiap elemen masyarakat, pemerintah Kota memilih strategi dengan mengedepankan 3 (tiga) pilar pranata sosial yang ada dan berpengaruh besar dalam masyarakat, yaitu Masjid, *Dayah* (Pesantren) dan Sekolah-sekolah umum mulai dari SD sampai SMA. Ketiga lembaga tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : *Pertama*, Sosialisasi syariat Islam melalui masjid. Masjid tidak hanya sebagai tempat shalat lima waktu saja, tetapi harus

⁵¹ Mawardy Nurdin, *Op.Cit*, hlm.280.

⁵² Diolah dari hasil wawancara dengan Zahrol Fajri, S.Ag, MH, Kabag Keistimewaan setda Kota Banda Aceh.

dapat difungsikan untuk semua kepentingan masyarakat, baik untuk kepentingan ibadah, muamalah, siyasah dan pendidikan, seperti menjadi pusat studi keislaman.

Kedua, sosialisasi syariat Islam melalui lembaga pendidikan *dayah* (pesantren). Keberadaan lembaga *dayah* di Aceh, juga di Banda Aceh, akhir-akhir ini mulai tumbuh dan berkembang pesat. Apalagi Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pengembangan pendidikan agama di *dayah*, seperti untuk pembangunan sarana dan pra-sarana, biaya operasional dan lain-lain. Perkembangan ini di satu sisi menunjukkan adanya semangat para ulama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam rangka mendidik kader bangsa yang cerdas dan berakhlak mulia. Namun di sisi lain tumbuh pula sejumlah *dayah* yang hanya menjadikan lembaga pendidikan ini untuk mencari keuntungan pribadi.

Ketiga, Sosialisasi syariat Islam melalui lembaga pendidikan formal yang dimulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan melakukan penambahan jam pelajaran agama bagi siswa, meliputi pelajaran akhlak, tauhid, fiqh, mendidik *da'i* sekolah dan lain-lain. Kegiatan ini dinamakan dengan Program *Diniyah* untuk Sekolah. Untuk menggerakkan program ini pemerintah bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mempersiapkan segala keperluan, mulai dari mempersiapkan tenaga guru, menyusun materi ajar (silabus), dan menyiapkan

anggaran yang memadai, baik untuk kepentingan bahan ajar maupun untuk honor tenaga pengajar.⁵³

Mawardi menambahkan bahwa hingga saat ini capaian pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain :

- a. Meningkatnya jumlah rumah ibadah, seperti masjid, *meunasah* dan musalla. Menurut data yang ada, jumlah rumah ibadah di Kota Banda Aceh hingga tahun 2010 mencapai 201 buah, terdiri dari 91 buah masjid dan 110 buah *meunasah*/ musalla.
- b. Giatnya upaya pemerintah dalam melakukan sosialisasi tentang syariat Islam hingga ke wilayah Kecamatan, Kelurahan dan *Gampong*, sehingga tingkat pemahaman masyarakat terhadap syariat Islam mulai tumbuh, meskipun belum secara merata. Keberhasilan ini ditandai oleh meningkatnya jumlah jamaah shalat lima waktu di sejumlah masjid dan mushalla di kawasan Kota Banda Aceh.
- c. Tumbuhnya dukungan dari para pimpinan Daerah, seperti DPRK, MPU, Ormas Islam dalam rangka meningkatkan pelaksanaan syariat Islam.⁵⁴

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk mensukseskan pelaksanaan syariat Islam dan upaya memperkuat basic keimanan masyarakat di Kota Banda Aceh. Semangat dan komitmen ini

⁵³ *Ibid*, hlm.282.

⁵⁴ *Ibid*, hlm.284

dapat dilihat dari seringnya kegiatan sosialisasi yang dilakukannya hingga ke wilayah Kecamatan dan ke *Gampong-Gampong*. Di sisi lain juga terlihat adanya semangat masyarakat untuk menjalankan syiar Islam baik melalui masjid, *meunasah*/musalla, seperti menghidupkan shalat lima waktu secara berjamaah.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat upaya penguatan Aqidah

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung ikut menentukan sukses tidaknya suatu program yang dijalankan suatu organisasi atau lembaga. Sosialisasi Syariat Islam dan upaya penguatan aqidah juga ikut dipengaruhi oleh ada tidaknya faktor pendukung. Di antara faktor pendukung penguatan aqidah yang sudah ada saat ini terekam dari wawancara dengan Tgk Muhd.Jamil, salah seorang tokoh masyarakat Kota Banda Aceh berikut yang menyebutkan bahwa di antara faktor pendukung pelaksanaan Syariat Islam di Banda Aceh yang telah dimiliki saat ini adalah adanya *good will* (keinginan dan semangat yang tinggi) dari pemerintah Kota Banda Aceh. Semangat ini telah berujung pada tingginya komitmen, khususnya Walikota dan Wakil Walikota untuk mensukseskan pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh. Secara khusus ia menyebutkan kemauan dan keberanian wakil Walikota yang masih mau terjun langsung ke masyarakat dan

lokasi-lokasi rawan pelanggaran terhadap Qanun Syariat, baik siang maupun malam hari untuk menegakkan Syariat Islam pantas sekali didukung oleh setiap komponen masyarakat. Ia menambahkan bahwa komitmen menegakkan Syariat Islam oleh Pemerintah diikuti dengan dianggarkannya anggaran yang memadai untuk keperluan sosialisasi itu. Di samping itu terdapat juga beberapa karya nyata yang diperlihatkannya seperti pembentukan Tim *Amar Ma'ruf, Muhtasib Gampong*, dan yang paling penting adalah diadakannya Komite Penguatan Aqidah itu (KPA – PAI).⁵⁵

Sejumlah informan lain baik dari jajaran Pemerintah menuturkan bahwa salah di antara faktor pendukung yang dimiliki saat ini adalah (1) adanya Undang-Undang yang mengatur tentang pelaksanaan Syariat Islam bagi masyarakat Aceh. Undang-Undang tersebut selanjutnya diperkuat lagi oleh lahirnya sejumlah Qanun yang mengatur pelaksanaan Syariat secara spesifik; (2) adanya komitmen dan keseriusan Pemerintah Kota untuk menjalankan Undang-Undang dan Qanun tersebut secara baik, sehingga bagaimanapun juga bila penguasa (umara) telah berada di depan dalam membela kepentingan Islam maka yang lain pasti akan ikut dengan sendirinya; (3) tersedianya anggaran yang memadai untuk kepentingan pelaksanaan Syariat Islam; (4) adanya dukungan lembaga-lembaga kemitraan seperti MPU, MAA dan MPD dalam menyukseskan pelaksanaan Syariat

⁵⁵Diolah dari hasil wawancara dengan Tgk Muhd. Jamil, Jeulingke Kota Banda Aceh.

Islam; (5) mengalirnya dukungan moril dari berbagai organisasi Islam yang ada di Banda Aceh; serta (6) dukungan masyarakat Kota yang mulai tumbuh secara pelan-pelan.⁵⁶

Beranjak dari data yang dikumpulkan dari para informan di atas dapat dikemukakan paling tidak terdapat 4 (empat) faktor pendukung utama dalam melakukan penguatan aqidah masyarakat, antara lain :

- a. Tingginya komitmen pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam baik di kalangan masyarakat biasa maupun di kalangan pegawai negeri yang bekerja di bawah naungan Pemerintah Kota. Komitmen ini terlihat dari dibentuknya “Forkopimda” (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) oleh Pemerintah Kota yang keanggotaannya terdiri dari Walikota dan wakil Walikota, Dandim, Poltabes, Kajari dan MPU.
- b. Pembentukan organisasi pembela aqidah, yaitu Komite Penguatan Aqidah dan Peningkatan Amal Ibadah (KPA – PAI).
- c. Adanya dukungan dana yang memadai, khususnya dari Pemerintah Kota untuk merancang dan melaksanakan berbagai program kerja berkenaan dengan penguatan syariat Islam bagi masyarakat.
- d. Adanya dukungan positif masyarakat dan organisasi-organisasi Islam terhadap proses pelaksanaan syariat Islam yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama menjaga ketertiban

⁵⁶ Diolah dari hasil wawancara dengan Bakhtiar, S.Ag, MH, Kabid bina ibadah/ muamalah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.

gampong dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Syariat Islam.

- e. Adanya komponen pendukung yang dibentuk sendiri oleh Pemerintah Kota dan Dinas Syariat Islam sehingga memudahkan pemerintah, khususnya Dinas Syariat Islam dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Komponen pendukung lainnya antara lain terdiri dari (1) Polisi Syariat atau lebih dikenal dengan sebutan *Wilayatul Hisbah*; (2) Komite Penguatan Aqidah dan Peningkatan Amal Ibadah (KPA – PAI); (3) Tim Amar Ma'ruf nahi Munkar (Tamar); (4) *Muhtasib Gampong*, yaitu badan khusus yang dibentuk dan berperan sebagai perpanjangan tangan Dinas Syariat Islam di tingkat *gampong*. Mereka bertugas mendata kondisi sosial masyarakat seperti jumlah rumah kost, warung kopi, warnet dan tempat-tempat lain yang dinilai berpeluang menjadi tempat melakukan kegiatan maksiat dan sekaligus melakukan *sweeping* ke tempat-tempat tersebut; dan (5) Kelompok *Da'i-Daiyah* yang direkrut dari kalangan masyarakat sendiri alumni *dayah*, mahasiswa dan komponen lain yang dinilai memiliki semangat dan komitmen mengakkan syariat Islam. Kelompok ini telah dibentuk dan dilatih oleh Dinas Syariat Islam itu sendiri untuk tujuan melaksanakan sosialisasi (dakwah) Islam ke tempat-tempat umum baik yang di tempat-tempat yang rawan pelanggaran atau tidak rawan; dan (6) Brigade Masjid.

2. Faktor Pengambat.

Meskipun demikian sosialisasi pelaksanaan syariat Islam penguatan aqidah terus saja dilakukan, namun masih saja mengalami hambatan tertentu baik di kalangan pemerintahan sendiri maupun di kalangan masyarakat.

a. Hambatan dari Pemerintah.

Tantangan yang dirasakan di kalangan pemerintahan lain sebagai berikut :

- 1) Masih dirasakan belum semua Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menyambut baik dan mendukung sepenuhnya pelaksanaan syariat Islam, baik di lingkungan instansi masing-masing maupun di lingkungan masyarakat.
- 2) Masih kurangnya pendanaan untuk melaksanakan sosialisasi dan upaya-upaya penguatan aqidah umat Islam.
- 3) Terbatasnya personil petugas sosialisasi dan tenaga penguatan aqidah yang dimiliki Pemko Banda Aceh.

b. Hambatan dari Masyarakat

- 1). Belum semua elemen masyarakat itu memahami dengan baik tentang syariat Islam itu sendiri.
- 2). Tingkat kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap penguatan aqidah anak-anak dan remaja mereka dirasakan masih rendah.
- 3). Masih adanya sikap apatis di kalangan sebagian masyarakat terhadap berbagai bentuk pelanggaran syariat Islam yang terjadi di sekeliling mereka.

Sehubungan dengan itu, masih diperlukan peran, semangat dan komitmen Pemerintah dan masyarakat untuk secara bersama-sama mensosialisasikan syariat Islam dan membentengi aqidah Islamiyah secara terus menerus. Untuk kerjasama semua elemen masyarakat dengan pemerintah dipandang perlu ditingkatkan dalam rangka menyelamatkan aqidah masyarakat dari ancaman kemusyrikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa data dan analisis di atas dapat dikemukakan beberapa kesimpulan antara lain

1. Gerakan pendangkalan aqidah bukanlah sesuatu yang baru, akan tetapi merupakan bagian dari proses perjalanan sejarah umat Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya/ munculnya berbagai gerakan pendangkalan aqidah sejak masa Rasulullah hingga saat ini dengan nama dan bentuk gerakan yang berbeda-beda. Karena itu, gerakan ini diperkirakan akan terus berkembang dengan pola pergerakan yang bervariasi. Meskipun gerakan pendangkalan aqidah saat itu mulai muncul, namun masyarakat tidak terpecahkan karena mereka bisa meminta penjelasan secara langsung kepada Rasulullah.
2. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka muncullah perbedaan-perbedaan pemahaman dan penafsiran terhadap berbagai persoalan keummatan yang muncul dan berkembang secara dinamis. Namun perbedaan-perbedaan tersebut tidak sampai

melahirkan perpecahan di kalangan umat Islam karena mereka masih berpegang teguh pada ajaran ketauhidan yang murni sebagaimana diwariskan oleh Rasulullah dan para Sahabat. Namun perpecahan di kalangan umat Islam mulai dirasakan ketika munculnya pembahasan tentang ilmu kalam. Para ulama kalam mencoba memberikan berbagai pandangan mereka berkenaan dengan Ketuhanan sehingga umat Islam terpecah belah ke dalam beberapa kelompok/ sekte. Sekte-sekte yang muncul itu – sesungguhnya telah diramalkan oleh Rasulullah sendiri – hingga mencapai 73 sekte atau firqah. Para ulama muktabar berpendapat bahwa 72 di antara sekte tersebut dinyatakan sesat kecuali kaum ahlussunnah waljamaah.

3. Masyarakat Kota Banda Aceh – sebagaimana masyarakat Aceh lainnya – merupakan penganut paham ahlussunnah waljamaah. Paham ini telah diterimanya secara turun temurun sejak kehadiran Islam pertama di semenanjung nusantara ini. Meskipun pada tahap awalnya Islam yang dianut oleh masyarakat masih bercampur aduk dengan ajaran Hindu yang telah terlebih dahulu berkembang di Aceh, namun pelan-pelan kemurnian Islam terus dibersihkan sehingga terbebas dari pengaruh ajaran lain yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ketauhidan. Setelah sekian lama ajaran Islam yang murni itu berkembang dari masa ke masa, namun akhir-akhir ini kemurnian aqidah masyarakat mulai ternoda kembali oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab sehingga telah meresahkan masyarakat.

4. Menyikapi persoalan ini maka Pemerintah Kota Banda Aceh telah berupaya memberikan perhatian yang serius bagi upaya menanggulangi berkembangnya ajaran yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ketauhidan umat Islam. Di antara upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menanggulangi persoalan pendangkalan aqidah ini adalah melakukan upaya-upaya struktural seperti mengeluarkan regulasi tentang pelaksanaan syariat Islam dan penguatan aqidah, baik berupa qanun maupun pembentukan organisasi-organisasi sebagai wadah memperkuat basic keislaman/ketauhidan masyarakat. Di antara organisasi tersebut adalah dibentuknya : (1) *Wilayatul Hisbah*; (2) Komite Penguatan Aqidah dan Peningkatan Amal Ibadah (KPA – PAI); (3) Tim Amar Ma'ruf nahi Munkar (Tamar); (4) *Muhtasib Gampong*, yaitu badan khusus yang dibentuk dan berperan sebagai perpanjangan tangan Dinas Syariat Islam di tingkat *gampong* dan (5) *Da'i-Daiyah* Kota.
5. Upaya-upaya pemerintah tersebut dapat dikategorikan sebagai wujud gerakan dakwah struktural yang dikembangkan Pemko dalam upaya menanggulangi gerakan pendangkalan aqidah masyarakat. Upaya ini dipandang memiliki nilai strategis bagi upaya penyelamatan aqidah masyarakat. Meskipun beberapa upaya sistematis tersebut telah dilakukan Pemerintah namun tidak berarti bahwa gerakan pendangkalan aqidah itu sudah menghentikan aktivitasnya. Karena itu kewaspadaan

masyarakat dan pemerintah terhadap bahaya latin gerakan pendangkalan aqidah ini perlu dilakukan.

B. Saran/ Rekomendasi.

1. Gerakan pendangkalan aqidah merupakan yang membahayakan umat Islam. Karena itu Pemerintah bersama masyarakat Aceh, khususnya umat Islam, harus mampu mengenali ciri-ciri pergerakan mereka sehingga masyarakat tidak akan tertipu dengan strategi yang mereka gunakan dengan mengembangkan missinya.
2. Upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota selama ini, terutama strategi dakwah struktural dan kultural ini, dinilai cukup efektif bagi upaya menghalau gerakan pendangkalan Aqidah, namun belum mampu menjamin bahwa gerakan tersebut tidak akan muncul kembali di Aceh. Karena itu gerakan upaya-upaya strategis lainnya dalam bentuk upaya jangka pendek, menengah dan jangka panjang perlu dirumuskan secara bersahaja.

DAFTAR BACAAN

I. Buku :

- Burhan Bungin, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif ; Aktualisasi metodologis Ke arah Ragam Varian Kontemporer*, Rajawali press, Jakarta.
-, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet.IV, Kencana, Jakarta.
- Dadang Kahmad, 2000, *Sosiologi Agama*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- George Ritzer, 2004, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan, Predana Media, Jakarta.
- Hasan Al-Banna, 1983, *Aqidah Islamiyah*, terj. Hasan Baidlowi, Al-Mu'arif, Bandung.
- Hendropuspito.D, 1983, *Sosiologi Agama*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Judistira K.Garna, 1996, *Ilmu Sosial Dasar – Konsep – Posisi*, Program Pascasarjana, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Khurshid Ahmad, dkk, 1989, *Prinsip-Prinsip Pokok Islam*, Rajawali press, Jakarta.
- Komaruddin Hidayat dan Azyumardi Azra, 2006, *Pendidikan Kewargaan : Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, ICCE, Jakarta.
- Lexy J Moleong, 1997, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet.VIII, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Luis Ma'luf, 1997, *Al-Munjid*, Darul Masyriq, Beirut.

- Margaret M Poloma, 1987, *Sosiologi Kontemporer*, Terj. Yasogama, Yogyakarta.
- Mawardi Nurdin, 2011, *Strategi Membangun Kota Banda Aceh Berbasis Kompetensi*, Global, Jakarta.
- M.Amin Djamaluddin, 2000, *Bahaya Inkarussunnah*, LPPI, Jakarta.
- Nana Syaodih Sukmadinata, 2005, *Metode Penelitian Pendidikan*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Samsul Bahri, 2011, *Tuntunan Aqidah*, Dinas Syariat Islam Aceh, Banda Aceh.
- Siradjuddin Abbas, 2008, *I'tiqad Ahlussunnah Waljamaah*, cet.VIII, Pustaka Tarbiyah Baru, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Tim Penyusun, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Tim Penyusun, 2008, *Fatwa Pedoman Identifikasi Aliran Sesat*, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Banda Aceh.
- Tim Penyusun, 2012, *Banda Aceh Dalam Angka*, Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh.
- Wardi Bachtiar, 2006, *Sosiologi Klasik : Dari Comte hingga Parsons*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Zamroni, 1992, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta.

II. Majalah/ Koran :

Harian Serambi Indonesia.
Harian Atjeh Post.
Majalah Media Dakwah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Drs Juhari, M.Si
 NIP : 196612311994021006
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Tempat/ Tanggal Lahir : Aceh Utara/ 1966
 Pangkat/ Golongan : Pembina (IV/a)
 Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry
 Bidang Keahlian : Sosiologi
 Alamat : Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Ar-Raniry

PENGALAMAN PENDIDIKAN

No	P.T.	KOTA	BID.STUDI	LULUS
1.	Fak.Dakwah IAIN Ar-Raniry	Banda Aceh	Bimb dan Penyuluhan Masyarakat	1992
2.	PPs Unpad	Bandung	Sosiologi	2000

PUBLIKASI KARYA ILMIAH

No	JUDUL	PENERBIT	KOTA	TAHUN
1.	Peran Wilayatul His- bah Dlm Menegakkan Dakwah Struktural.	Pusit IAIN Ar-Raniry	Banda Aceh	2008

2.	Peran MAA Dalam Menghadapi Perubahan Sosial di Aceh.	Pusit IAIN Ar-Raniry	Banda Aceh	2010
3.	Perubahan Sosial Dlm Perspektif Al-Qur'an.	Jurnal Al-Qiraah	Banda Aceh	2010
4.	Pencitraan Ulama Dalam Al-Qur'an	Jurnal Al-Qiraah	Banda Aceh	2012

Banda Aceh, 28 Oktober 2013

Peneliti,

Drs Juhari, M.Si